

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 25 DAN 29 SEPTEMBER 2023



TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RAPERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG

RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RAPERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Hari : Senin

Tanggal : 25 September 2023

Waktu : 11.00 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. SIFAT RAPAT : Terbuka
- III. ACARA RAPAT :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati atas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Skors (untuk penyusunan Pandangan Umum Fraksi);
4. Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Skors (untuk penyusunan Jawaban Bupati);
6. Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda Perubahan dan Pajak;

7. Pembentukan Panitia Khusus membahas Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
8. Skors (pemilihan ketua dan wakil ketua Pansus);
9. Penetapan Pimpinan Pansus;
10. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : **H. Supadi**
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : **Nur Purnomo M, S.IP.**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 7 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 8 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 7 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 4 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 4 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	: 39 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 2 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 1 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 1 orang
Jumlah	: 6 orang

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat	: Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang terhormat	: Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
Dan yang kami hormati	: Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Assisten Sekda, Kepala OPD dan Camat se Kabupaten Rembang

Mengawali rapat paripurna, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini Senin tanggal 25 September 2023, kita berkesempatan mengikuti Rapat Paripurna Pertama dalam membahas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah dengan keadaan sehat walafiat. Pembahasan Rancangan Perda ini adalah

tindak lanjut hasil rapat paripurna pada tanggal 13 September 2023 dalam rangka perubahan agenda kegiatan DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD bahwa anggota DPRD sejumlah 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir pada rapat paripurna ini adalah sebanyak 33 orang.

Keabsahan rapat paripurna ini tertuang pada Pasal 114 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang menjelaskan bahwa “ *Rapat Paripurna DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD* ”.

Dengan demikian kuorum rapat telah terpenuhi, , maka dengan mengucapkan “*Bismillahirrohmanirrohim*” tepat pukul 12.20 WIB rapat paripurna dsalam membahas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Pajak dan Retibusi Daerah saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Memperhatikan agenda dan jadwal yang ditetapkan pada rapat paripurna tanggal 13 September 2023, selanjutnya saya bacakan susunan acara rapat paripurna yaitu sebagai berikut :

1. Pembukaan;

2. Penjelasan Bupati atas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Skors (untuk penyusunan Pandangan Umum Fraksi);
4. Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Skors (untuk penyusunan Jawaban Bupati);
6. Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda Perubahan dan Pajak;
7. Pembentukan Panitia Khusus membahas Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
8. Skors (pemilihan ketua dan wakil ketua Pansus);
9. Penetapan Pimpinan Pansus;
10. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Marilah kita masuki acara kedua rapat paripurna hari ini yaitu Penjelasan Bupati atas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat disilahkan.

== PENJELASAN BUPATI ATAS RAPERDA ==

➤ *(Penjelasan Bupati atas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah terlampir)*

Terima kasih Saudara Bupati atas penjelasannya.

Peserta rapat dan hadirin yang berbahagia,

Demikian tadi telah kita ikuti dan dengar bersama Penjelasan Bupati atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dari penjelasan ini, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Fraksi-Fraksi dengan pandangan umumnya. Untuk itu, perlu kita berikan waktu kepada Fraksi-Fraksi dan rapat paripurna saya skors selama 10 menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu yang diberikan kepada Fraksi telah habis, maka skors saya cabut, dan rapat kita teruskan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Kita ikuti acara yang keempat, yaitu Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kepada yang ditunjuk untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi, saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdri. Siti Rizqiyah PDA
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Joko Suwito, S.E.
3. Fraksi Nasional Demokrat : Sdr. Khamid, S.E.,Sy.
4. Fraksi PDI Perjuangan : Sdr. Widodo, S.H.
5. Fraksi Demokrat Hanura : Sdr. Dumadiyono, S.H.
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera : Sdr. Puji Santos, S.P.,M.H.

Selanjutnya, secara berurutan, dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, disilahkan.

===== PANDANGAN UMUM FRAKSI =====

➤ *(Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terlampir)*

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya. Dari pandangan umum Fraksi ini, selanjutnya akan ditanggapi oleh Bupati dengan jawaban Bupati. Untuk rapat paripurna saya skors kembali selama 10 menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu yang diberikan kepada Saudara Bupati telah habis, maka skors saya cabut, dan rapat kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita masuki acara keenam yaitu Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Pajak dan Retribusi. Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat disilahkan.

===== JAWABAN BUPATI =====

Terimakasih Saudara Bupati atas jawabannya.

➤ *(Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Pajak dan Retribusi terlampir)*

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Kita ikuti acara selanjutnya, acara ke tujuh yaitu Pembentukan Panitia Khusus membahas Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai hasil rapat Pimpinan Gabungan dan Rapat Badan Musyawarah tanggal 31 Agustus 2023, bahwa Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah dibahas oleh Pansus dengan jumlah anggota sebanyak 15 (lima belas) orang yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.

Dari usulan Fraksi yang disampaikan kepada Sekretaris DPRD, telah tersusun anggota Panitia Khusus untuk membahas Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana fotocopy yang berada pada rekan-rekan anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini. Sebelum anggota Panitia Khusus ini disahkan dengan Keputusan DPRD, maka perlu persetujuan terlebih dahulu dari anggota dalam rapat paripurna ini. Saya tawarkan kepada Saudara-Saudara :

“ Apakah anggota Panitia Khusus Membahas Raperda tentang Pajak dan Retribusi sebagaimana usulan fraksi yang fotocopynya berada pada Saudara-Saudara dapat disetujui ? “

===== SETUJUUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan telah disetujuinya anggota Panitia Khusus, maka perlu dibentuk Pimpinan Panitia Khusus yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua. Pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan bahwa “ Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus “. Merujuk hal tersebut, maka kepada anggota

Pansus untuk melakukan pemilihan, dan tempat yang digunakan adalah Ruang Kerja Komisi II.

Untuk hal tersebut, rapat paripurna saya skors selama 5 menit.

(Ketuk palu 1 kali)

=====ACARA PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS=====

Waktu pemilihan pimpinan Pansus telah habis, maka skors saya cabut dan rapat saya lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan berita acara yang diserahkan kepada kami, telah ditetapkan ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus untuk membahas Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu sebagai berikut :

K e t u a : Sdr. Drs. H. Muh. Subawoto

Wakil Ketua : Sdr. Muhammad Anshori

“ Apakah disetujui ?”

===== SETUJUUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Agenda pokok rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat pada hari ini. Kami atas nama pimpinan DPRD mengucapkan terimakasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala

kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini. Akhirnya, dengan mengucapkan “*Alhamdulillahillobbibil ‘alamiin* “ tepat pukul 13.55 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Sekian,

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA ,



H. SUPADI

SEKRETARIS,



NUR PURNOMO M, S.IP

Pembina Tingkat I
NIP. 19730401 199303 1 002

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RAPERDA PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati ,Sekda Kabupaten Rembang, OPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Pengantar Nota Keuangan tentang Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Penjelasan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- LAMPIRAN III : Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- LAMPIRAN IV : Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- .

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023

HARI/TANGGAL : SENIN, 25 SEPTEMBER 2023

PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. SUPADI	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	SUMARDI	Anggota	4	
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7	
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8	
9	ABDUL ROUF	Anggota	9	
10	MUHAMMAD ANSHORI	Anggota	10	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
11	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	11 ✓	
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	✓
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT			
19	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	

	FRAKSI PDI PERJUANGAN			
26	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	26	
27	JASMANI	Anggota	27	
28	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	28	
29	WIDODO, S.H.	Anggota	29	
30	ADI PURWOTO	Anggota	30	
31	SUMARSIH	Anggota	31	
	FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
32	H. GUNASIH, S.E	Anggota	32	
33	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	33	
34	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	34	
35	MOH NUR HASAN ,S.H.M.H.	Anggota	35	
36	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	36	
37	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
38	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	38	
39	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	39	
40	AGUS SUTRISNO	Anggota	40	
41	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	41	
42	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	42	
43	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	43	
44	BASIRUN	Anggota	44	
45	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DAFTAR HADIR BUPATI , WAKIL BUPATI REMBANG DAN SEKDA REMBANG
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023

HARI/TANGGAL : SENIN, 25 SEPTEMBER 2023
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1.
2	H. MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO.	Wakil Bupati Rembang	2.
3	FAHRUDIN, S.H.,M.H.,CFrA	Sekertaris Daerah	3.

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

NUR PURNOMO MUKDIWIDODO S.IP
NIP. 197704011993031002

**RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

**HARI/TANGGAL : SENIN, 25 SEPTEMBER 2023
PUKUL : 10.00 WIB**

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI	Sky Regah Wibisono	STAF AHLI	2
3	STAF AHLI BUPATI	A. Dadi Anon	STAF AHLI	3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA	H. Agus Salim	As. Pamar	5
6	ASISTEN II SEKDA	Mars		6
7	ASISTEN III SEKDA	M. Wahyuni	As. 2	7
8	BAG. PEMERINTAHAN	GUNARI	Katag.	8
9	BAG. HUKUM	Dedyat	6	9
10	BAG. PROKOPIMDA	Nur Rofik	Kab	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Wiyoto	Kabag.	11
12	BAG. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ORGANISASI	HERU SUSILO	KABAG	14
15	BAG. UMUM			15
16	BAG. PBJ			16
17	BPPKAD	Fery Sumart	Ka	17
18	INSPEKTORAT			18
19	BAPPEDA			19
20	DINSOSPGBK	PRAPTO. R		20
21	B K D	Tom M	sekban	21
22	B P B D			22
23	DPU TATA RUANG			23
24	DINPERKIM			24
25	DINAS KESEHATAN	Ali Gofri	K. PKK	25
26	DINDIKPORA			26
27	DININDAGKOP & UMKM	Masfudh	Kadis -	27

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
28	DINPERINNAKER	Dwi Murtana	Kabid	28
29	DINTANPAN	Agus Iwan H	Kabid	29
30	DINLUTKAN	CHOLIB	KADIS	30
31	DINKOMINFO	Gautama		31
32	DINAS PERHUBUNGAN	Daryado	Kasubh	32
33	DINAS DUKCAPIL	Sepren		33
34	DINPERMADES	Slamet Haryadi	Kadis	34
35	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	MUTABIN	Kadit	35
36	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			36
37	BADAN KESBANGPOL	Har Jon	Sekban	37
38	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	Ed Ragn Fity	Sek Dir	38
39	DINAS PMPTSP			39
40	RSUD dr. R. SUTRASNO			40
41	SATPOL PP	Fitri Suci	Kasubh	41
42	Koramil BPPK	Koramil	Kabid	42
43				43
44				44
45				45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50
51				51
52				52
53				53
54				54
55				55
56				56
57				57
58				58
59				59

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
60				60
61				61
62				62
63				63
64				64
65				65
66				66
67				67
68				68
69				69
70				70
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80

SEKRETARIS DPRD KAB. BEMBANG

SETWAN

NOR PURNOMO MUKDIWIDODO S.IP

NIP. 19780401 199303 1 002

**DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG**

TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023

HARI/TANGGAL : SENIN, 25 SEPTEMBER 2023

PUKUL : 10.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	A. RUDAT	1
2	CAMAT KALIORI	WAJID. SH.	2
3	CAMAT SUMBER	Hadi SUBENA	3
4	CAMAT SULANG	Maruli Dwi R	4
5	CAMAT BULU		5
6	CAMAT PAMOTAN		6
7	CAMAT GUNEM	KASTADI	7
8	CAMAT SALE	MOH. IMRON	8
9	CAMAT LASEM	Syahrul	9
10	CAMAT PANCUR	KARTIMAN	10
11	CAMAT SEDAN	Iskandar	11
12	CAMAT SLUKE	M. Arifin	12
13	CAMAT KRAGAN	Nur Wanto	13
14	CAMAT SARANG	Andhika	14


 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
 NUR PURNOMO MUKDIWIDODO S.IP
 NIP. 19730401 199303 1 002



BUPATI REMBANG

PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi
dan segenap anggota DPRD;

Yang saya hormati, Sdr. Sekretaris Daerah beserta TAPD Kabupaten
Rembang

Sdr. Kepala OPD dan Camat se Kabupaten
Rembang

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT, kita dapat menghadiri
rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pengantar Nota Keuangan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Rancangan Perubahan APBD TA 2023 disusun dalam rangka
menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan penganggaran
daerah dengan mendasari skala prioritas pembangunan, hal-hal yang
menjadi perhatian dalam menyusun Perubahan APBD Tahun 2023 dengan

mempertimbangkan hasil evaluasi dan kinerja pembangunan yang telah dicapai sebelumnya, isu-isu strategis serta kondisi makro perekonomian nasional yang tentunya akan berimplikasi pada pelaksanaan Perubahan APBD khususnya yang berkaitan dengan sinergi antar sektor dan antar wilayah sebagai wujud pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2023. Selain itu Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan yang terjadi berupa dampak sosial dan ekonomi. Sehingga kebijakan, strategi serta program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Rembang tahun 2023 tetap berfokus pada pencapaian tujuan dan sasaran dengan tema **"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Perekonomian Daerah, Kualitas Infrastruktur, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien"**.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya Hormati,

Tujuan utama Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah pelaksanaan program prioritas sebagai berikut :

1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;
2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing;
3. Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan;
4. Pemantapan pengendalian tata ruang dan infrastruktur yang meliputi peningkatan ketersediaan air baku;
5. Penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian;
6. Peningkatan Kemandirian Desa;
7. Penanganan Stunting.

Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan komitmen dan ketaatan Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Struktur Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Kebijakan Penganggaran Pendapatan Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan telah memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.958.738.889.150,- Jumlah ini naik sebesar Rp. 23.176.408.150,- dari target pendapatan daerah pada APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp. 1.935.562.481.000,-

2. Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya terus meningkatkan kualitas belanja daerah secara menyeluruh. Total belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.002.908.101.424,- Jumlah ini berkurang sebesar Rp. 34.650.335.357,- dari total belanja daerah pada APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp. 2.037.558.436.782,-

3. Pembiayaan Daerah :

Penerimaan pembiayaan dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2023 sebesar Rp. 69.669.212.274,- Jumlah ini berkurang sebesar Rp. (102.326.743.508) dari total Penerimaan Pembiayaan daerah pada APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp. 171.995.955.782,-

Pengeluaran pembiayaan dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2023 sebesar Rp. 25.500.000.000,- Jumlah ini berkurang sebesar Rp. (44.500.000.000) dari total Penerimaan Pembiayaan daerah pada APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp. 70.000.000.000,-

Berikut kami sampaikan struktur Rancangan PERDA tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 :

Uraian	APBD Tahun 2023	Rancangan Perubahan APBD 2023	Bertambah / (Berkurang)
PENDAPATAN DAERAH	1.935.562.481.000	1.958.738.889.150	23.176.408.150
Pendapatan Asli Daerah	377.263.491.000	375.067.739.753	(2.195.751.247)
Pajak Daerah	155.124.585.000	155.124.585.000	0
Retribusi Daerah	33.524.500.000	33.470.500.000	(54.000.000)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.212.500.000	20.212.500.000	-
Lain - lain PAD yang Sah	168.401.906.000	166.260.154.753	(2.141.751.247)
Pendapatan Transfer	1.555.198.990.000	1.581.571.152.297	26.372.162.297
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.419.064.752.000	1.433.373.914.297	14.309.162.297
Pendapatan Transfer Antar Daerah	136.134.238.000	148.197.238.000	12.063.000.000
Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.100.000.000	2.099.997.100	(1.000.002.900)
Pendapatan Hibah	3.100.000.000	2.099.997.100	(1.000.002.900)
BELANJA	2.037.558.436.782	2.002.908.101.424	(34.650.335.358)
Belanja Operasi	1.340.217.484.283	1.301.754.454.024	(38.463.030.259)
Belanja Pegawai	777.825.013.387	760.612.379.918	(17.212.633.469)
Belanja Barang dan Jasa	379.254.770.964	345.044.870.160	(34.209.900.804)
Belanja Bunga	6.500.000.000	4.700.000.000	(1.800.000.000)
Belanja Hibah	169.967.699.932	182.596.403.946	12.628.704.014
Belanja Bantuan Sosial	6.670.000.000	8.800.800.000	2.130.800.000
Belanja Modal	305.646.248.854	323.149.256.755	17.503.007.901
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.843.027.254	60.274.757.497	15.431.730.243
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	151.163.553.600	111.531.067.431	(39.632.486.169)
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	109.359.668.000	151.213.431.827	41.853.763.827
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	230.000.000	130.000.000	(100.000.000)
Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000	0	(50.000.000)
Belanja Tidak Terduga	3.567.500.000	1.807.187.000	(1.760.313.000)
Belanja Transfer	388.127.203.645	376.197.203.645	(11.930.000.000)
Belanja Bagi Hasil	12.687.802.949	12.687.802.949	0
Belanja Bantuan Keuangan	375.439.400.696	363.509.400.696	(11.930.335.358)
SURPLUS / (DEFISIT)	(101.995.955.782)	(44.169.212.274)	57.826.743.508
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	171.995.955.782	69.669.212.274	(102.326.743.508)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	171.995.955.782	28.562.969.761	(143.432.986.021)
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	41.106.242.513	41.106.242.513
Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000.000	25.500.000.000	(44.500.000.000)
Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	0	(20.000.000.000)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	50.000.000.000	25.500.000.000	(24.500.000.000)
PEMBIAYAAN NETTO	101.995.955.782	44.169.212.274	(57.826.743.508)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-	-

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini Pemerintah Kabupaten Rembang juga mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hal ini sebagai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, esensinya adalah kesetaraan alokasi sumberdaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta bertujuan mengatur peningkatan dan optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Pointer atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara identifikasi objek-objek pajak daerah maupun retribusi daerah secara potensial yang belum terpetakan serta dengan melakukan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, serta jenis retribusi daerah yang ada.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berfokus pada penyesuaian tarif pajak daerah yang lebih optimal serta penyesuaian ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah dengan tetap mempertimbangkan perkembangan dan kondisi perekonomian di Kabupaten Rembang serta mempertimbangkan aspek sosial, budaya, kesediaan membayar wajib pajak dan tingkat kepatuhan masyarakat.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya Hormati,

Demikian telah kami sampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terhadap hal-hal yang belum jelas, tentunya akan disampaikan dalam agenda pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Rembang lebih lanjut di tingkat Badan Anggaran. Saya berharap untuk segera dibahas secara mendalam, obyektif dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat ditetapkan sesuai tahapan selanjutnya disahkan menjadi Peraturan Daerah.

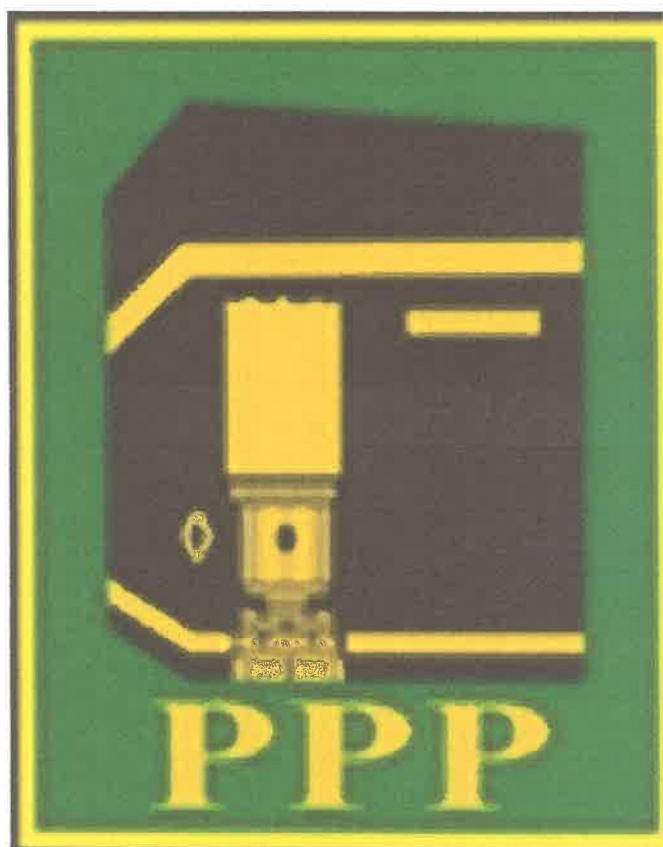
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 25 September 2023

BUPATI REMBANG

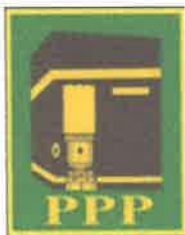
H. ABDUL HAFIDZ, S.PdI

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2023
DAN RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN REMBANG.



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

H a r i / Tanggal : SENIN / 25 SEPTEMBER 2023
Dibacakan oleh : RISQIYAH PUTRI DWI ANI, S.Pd



**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

**Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG**

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

**RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2023**

**DAN RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN REMBANG.**

Senin, 25 September 2023

Dibacakan oleh : RISQIYAH PUTRI DWI ANI, S.Pd

Assalamu a'laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

*Bismillah., Alhamdulillah., Assholatu Wassalamu a'la Rosulilla., Wa'alaa alihi wasohbihi
waman walah., laahaula walaa quwwata illabillah..., Amma ba'da.....*

Yang kami hormati :

=> Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

=> Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.

- => Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Bagian Setda Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf , dan semua ..
- => Sdr. Camat di wilayah Kabupaten Rembang , yang berbahagia

Sebelum kami melanjutkan, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas semua limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan hadir dalam Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat Wal afiat.

Sholawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita MUHAMMAD SAW, dan kepada para shahabat, serta kepada seluruh keluarganya... Amiin.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian Pandangan Umum kami terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023, yang paparan dan penjelasannya telah disampaikan oleh sdr. Bupati beberapa saat yang baru lalu dalam rapat paripurna hari ini Senin, tanggal 25 September 2023.

Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang atas kinerjanya, meskipun dalam situasi dan kondisi keuangan daerah yang sampai saat ini tergolong kurang lancar, masih tetap bekerja dengan penuh semangat. Semoga setelah APBD Perubahan ini ditetapkan dan disahkan, semua Program Prioritas kegiatan dapat dilaksanakan dengan mudah dan lancar, Amiin...

Dan kami juga memberikan apresiasi kepada TAPD Kab. Rembang, yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD tahun 2023 ini dapat diselesaikan sesuai jadwal waktu yang direncanakan, yang akhirnya dapat segera untuk dilakukan pembahasan.

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang cukup terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2023, yang dimulai dari pembahasan KUPA/PPAS Perubahan 2023 sampai tahap disepakatinya KUPA/PPAS Perubahan oleh Pihak Excutif yang dihadiri oleh sdr. Bupati dan Pimpinan DPRD, pada Rapat Paripurna DPRD hari Selasa tanggal 19 September 2023 yang lalu, dan juga setelah mendengarkan Paparan dan Penjelasan Sdr. Bupati, atas Raperda Tentang Perubahan APBD TA. 2023 pada Rapat Paripurna hari ini, Senin 25 September 2023.

Di dalam Pandangan Umum ini, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyampaikan beberapa catatan dan masukan , sebagai berikut :

A. TERKAIT DENGAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 :

1. Di dalam rapat pembahasan bersama OPD dilaporkan bahwa Realisasi APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sampai dengan ahir bulan Agustus 2023, terlaporkan bahwa realisasi kegiatan dari seluruh OPD, rata-rata capaian progress kegiatannya baru sebesar antara 42,45 %, dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar 38,12 %, kami menilai bahwa Progress tersebut termasuk dalam kategori *RENDAH* atau *LAMBAT*. Maka sehubungan dengan hal tersebut, agar penyerapan APBD Perubahan tahun 2023 bisa maksimal, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan minta, agar Pemkab dan semua Jajarannya, meningkatkan kinerjanya dengan bekerja lebih keras dan lebih serius, sehingga di akhir tahun 2023 ini dapat menyelesaikan semua program yang telah direncanakan.
2. Terkait dengan kebutuhan anggaran untuk pembayaran pegawai, yang masih belum tercukupi genap 12 bulan, misal pada Dinpermades, dan kebutuhan anggaran operasional pada Satpol PP, dan kebutuhan anggaran untuk pelayanan masyarakat, yaitu anggaran pengambilan blanko kartu KTP di kementrian, pada Dindukcapil, karena untuk menunjang Persiapan Pelaksanaan Pemilu tahun 2024, maka sehubungan dengan hal tersebut, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mohon agar anggaran untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat tersebut dicukupi.

B. TERKAIT RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

1. Pajak daerah dan Retribusi daerah, adalah sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah, dan sebagai sumber pendapatan asli daerah, esensinya adalah kesetaraan alokasi sumberdaya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Sesuai amanah pasal 94, UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah, ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah.
3. Maka sehubungan dengan hal tersebut pada point 1 dan 2 tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Rembang harus segera menerbitkan PERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

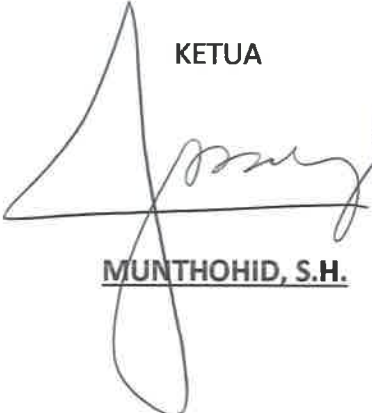
Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2023 ini, dan selanjutnya mohon agar segera untuk dilakukan pembahasan.

Terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

Billahi Taufiq wal Hidayah..., Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang, 25 September 2023

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

		
KETUA		SEKRETARIS
<u>MUNTHOHID, S.H.</u>		<u>H. SUNARDI, S.Pd.I</u>



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Tentang;

**PENJELASAN BUPATI TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RAPERDA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Disampaikan oleh :
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang
Senin, 25 September 2023

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,,

Yang Terhormat, Bupati dan Wakil Bupati Kab. Rembang

Yang Kami Hormati, Ketua dan Para Wakil Ketua beserta segenap Anggota
DPRD Kab. Rembang

Yang Kami Hormati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staff Ahli Bupati dan Sekretaris
DPRD Kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang Kami Hormati, Para Pimpinan Kesatuan TNI-POLRI, Pengadilan Negeri
dan Kejaksaan Negeri Rembang.

Yang Kami Hormati, Camat seKabupaten Rembang

Yang Kami Hormati, Pimpinan Parpol, Wartawan, Pimpinan Ormas, Organisasi
Wanita, LSM Serta Undangan sekalian yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Sidang Paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kab. Rembang atas penjelasan Bupati terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Serta Raperda Pajak dan Retribusi dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung “Muhammad SAW” yang selalu kita tunggu safaatnya sampai yaumul kiamah, Aamiin Allah Humma Aamiin.

Hadirin sidang paripurna yang saya hormati,

Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan komitmen dan ketaatan Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, maka kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) akan menyampaikan pemandangan umum yang berisi catatan kajian, saran serta masukan terkait Raperda Perubahan APBD Tahun 2023 berdasarkan Pengantar Nota APBD Perubahan Tahun 2023 dan Pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan Tahun 2023 serta Raperda Pajak dan Retribusi Daerah secara Obyektif dan mendalam.

Namun sebelum kami menyampaikan pemandangan umum fraksi PKB, saya mewakili teman-teman fraksi PKB mengucapkan “**Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW**” tanggal 28 September 2023, semoga kita mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dan Keselamatan. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Hadirin sidang paripurna yang berbahagia,

Berdasarkan Pengantar Nota Keuangan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa percaya bahwa Rancangan APBD

Perubahan Tahun 2023 telah disusun berdasarkan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang didasari skala prioritas pembangunan.

Namun setelah kami mempelajari secara seksama, kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan catatan serta masukan antara lain sebagai berikut:

➤ **Raperda Perubahan APBD TA 2023**

1. Berdasarkan Rapat Komisi dengan OPD serta Rapat Banggar dan TAPD, kami meyakini bahwa Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi daerah hampir pasti tidak akan tercapai, maka ini akan berakibat adanya belanja yang telah direncanakan tidak akan terbiayai atau bahkan gagal bayar. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten masih kurang teliti dalam merencanakan Target pendapatan asli daerah disektor pajak dan retribusi.
2. Adanya rasionalisasi pengeluaran pembiayaan pembentukan Dana Cadangan sebesar – Rp. 20.000.000.000,- dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo sebesar Rp 24.500.000.000,- secara Otomatis akan membebani APBD 2024.

Bagaimana solusi Pemkab dalam menjaga postur anggaran APBD 2024, takutnya hanya menaikkan SILPA dan Target PAD seperti yang sudah-sudah ??

3. Adanya penggunaan Anggaran yang tidak sesuai peruntukan yang berakibat beban anggaran berikutnya semakin terbebani. Baik anggaran yang berasal dari DAK, Earnmarking, dan lain sebagainya.

Mohon Bupati selaku Pelaksana pengguna Anggaran tertinggi di Kabupaten lebih Tegas dalam mengawasi penggunaan Anggaran yang tidak sebagaimana mestinya.

➤ **Raperda Pajak dan Retribusi Daerah**

Kami fraksi PKB mengapresiasi atas usulan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah mengingat masih belum Optimalnya Pajak dan Retribusi Daerah sehingga perlu adanya Payung Hukum yang jelas sesuai Kondisi riil saat

ini, Disamping Apresiasi kami juga memberikan saran dan masukan antara lain sebagai berikut;

1. Masih adanya kegiatan-kegiatan sektor pertambangan dan hiburan yang masih belum berijin, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
Bagaimana langkah konkrit pemkab dalam mengatasi permasalahan tersebut ??
2. Mohon dalam draft Rancangan Raperda Pajak dan Retribusi daerah berdasarkan regulasi yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masyarakat Rembang. Sehingga Raperda tersebut tidak membebani warga Rembang secara berlebihan dan terkesan demi meningkatkan PAD maka Pajak dan Retribusi di besarkan.

Hadirin sidang paripurna yang saya hormati,

Demikian pandangan umum Fraksi PKB atas penjelasan Bupati terhadap Raperda Perubahan APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah ini kami sampaikan. Maka dengan mengucapkan “**Bismillahirrohmannirrohim**” Kami, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa **MENYETUJUI** Raperda tersebut untuk dibahas pada pembahasan berikutnya. Atas Perhatian dan Kerjasamanya, kami ucapkan Terima Kasih.

Akhirul kalam Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq

Wassalamualaikum Wr. Wb

Rembang, 25 September 2023
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN REMBANG


Nasirudin, S.Si
Ketua




Ilyas
Sekretaris



PANDANGAN UMUM

**FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

- 1. PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2023**
- 2. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**



FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

PANDANGAN UMUM
FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG

- 1. PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2023**
- 2. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Salam Restorasi

Gerakan Perubahan

Yth. Bupati dan Wakil Bupati Rembang;

Yth. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yth. Sekretaris Dewan Kabupaten Rembang;

Yth. Staf Ahli Bupati Rembang;

Yth. Asisten I, II dan III Sekda Kabupaten Rembang;

Yth. Kepala Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Bagian se-Kabupaten Rembang;

Yth. Camat se-Kabupaten Rembang;

Yth. Para Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan ridho-Nya, sehingga kita semua dapat menghadiri acara penyampaian "**Pandangan Umum Fraksi**" dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita lantunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, dan semoga kita sebagai umat mendapatkan syafa'atNya di yaumul akhir. Amin Ya Robbal Alamin.

Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan para hadirin yang kami hormati.

Sebagaimana diketahui Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu Raperda strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat Kabupaten Rembang, karena APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kami telah mendengar dan menyimak pengantar nota keuangan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023. Oleh sebab itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, Kami dari Fraksi NasDem akan menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan para hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya, ijinkan kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi NasDem sebagai berikut:

A. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2023

1. Kami berharap beberapa hal yang sudah ditargetkan dalam rancangan perubahan APBD Tahun anggaran 2023 dapat tercapai dengan baik.
2. Penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian perlu mendapatkan perhatian serius karena para pedagang dan pelaku UMKM di Kabupaten Rembang mengalami penurunan omset yang cukup drastis dengan adanya pasar online.

3. Mengenai program percepatan penurunan angka kemiskinan dan penanganan stunting yang masuk dalam program prioritas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, mohon Pemda Kabupaten Rembang untuk membuat program-program yang efisien dan efektif dalam menyelesaikan masalah tersebut.
4. Mengenai keterlambatan dalam pencairan APBD induk 2023, mohon untuk waktu pencairannya dilakukan dengan efisien dan efektif.
5. Penyerapan dan pelaksanaan program pembangunan APBD induk Tahun Anggaran 2023 masih rendah dan perlu dioptimalkan.
6. Kami berharap Raperda ini akan menjadi Peraturan Daerah yang dapat menjawab kebutuhan, masalah, tantangan dan kondisi yang ada. Kami menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya dilakukan pembahasan.

B. RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. Kami mendukung Raperda Kabupaten Rembang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena hal ini mendukung kemajuan daerah, kesejahteraan masyarakat dan dapat mendorong kelangsungan pembangunan di Kabupaten Rembang.
2. Kami mendorong modernisasi proses pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan menggunakan sistem teknologi untuk memudahkan akses pelayanan.
3. Kreatifitas dan inovasi pemerintah daerah melalui OPD terkait harus terus dilakukan dengan menghadirkan kemudahan akses dalam pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah dan retribusi daerah, serta memastikan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah adalah dalam rangka pembangunan daerah, sehingga masyarakat meyakini bahwa apa yang dikeluarkan akan kembali manfaatnya untuk masyarakat.
4. Kami **menerima dan menyetujui** Raperda Kabupaten Rembang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dilakukan pembahasan.

Demikian pandangan umum Fraksi NasDem terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Semoga bisa bermanfaat untuk Kabupaten Rembang dan semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk serta jalan yang terbaik kepada kita semua. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 25 September 2023

**KETUA
FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

The block contains a circular official stamp of the Fraksi Nasional Demokrat (FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT) and a handwritten signature in black ink. The stamp features a central emblem and the text 'FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT' around the perimeter. The signature is a stylized, cursive script.

H. MASHADI, S.Pd., M.M.



PDI PERJUANGAN

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2023
DAN
RANCANGAN PERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Disampaikan Oleh :

**D a l a m
RAPAT PARIPURNA I
DPRD KABUPATEN REMBANG
SENIN, 25 SEPTEMBER 2023**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

FRAKSI PDI PERJUANGAN

Sekretariat : JL. P. Diponegoro.88 Rembang 59212
Telp. : (0295) 6911494

PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD

KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2023

DAN

RANCANGAN PERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

MERDEKA!

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang,

Yang terhormat, Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kab. Rembang,

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang,

Yang Terhormat, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Para Kabag di lingkungan Setda Kabupaten Rembang,

Yang terhormat, Ka Dinas/Badan, Ka Kantor/Instansi dan Camat se- Kabupaten Rembang,

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Para Kabag dan beserta jajarannya, Lsm, Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang kami hormati.

Mengawali penyampaian pandangan umum fraksi kali ini marilah kita bersama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari ini. Berikut Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di Yaumul Mahsyar. Aamiin Ya Robbal Alamin...

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,

Pada Rapat Paripurna kali ini, kami ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada Pimpinan Rapat beserta unsur Pimpinan Dewan, yang telah memberikan kesempatan kepada kami Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi tentang penjelasan Bupati terhadap rancangan perda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Setelah kita cermati bersama, rancangan perda perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati, kami dari Fraksi PDI Perjuangan berpendapat :

- Yang pertama, kami mohon Pemerintah Kabupaten untuk dapat lebih meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang perbendaharaan dan perencanaan penyusunan serta pengelolaan APBD, agar lebih optimal dalam penyerapannya guna meningkatkan serapan belanja daerah yang akuntabel, yang akhirnya berdampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
- Kedua, terkait progress realisasi anggaran yang sudah berjalan hingga saat ini, sejauh mana pencapaian visi misi dan program prioritas daerah di tahun 2023 ini sudah tercapai? dengan anggaran perubahan ini, target kinerja seperti apa yang ingin dicapai? Mengingat waktu pembahasan yang sudah dijadwalkan sangat singkat.
- Mengenai Raperda Pajak dan Retribusi Daerah, kami berharap Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pemetaan dan menyusun basis data terlebih dulu, sehingga mendapatkan data yang akurat dan terkini. Selain itu perlu dilakukan berbagai upaya strategis yang terukur dan berjenjang dan juga harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, juga yang tak kalah pentingnya adalah melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat sehingga masyarakat

tidak berasumsi bahwa mereka akan terbebani dengan pajak dan retribusi tersebut.

- Terakhir, kami dari Fraksi PDI Perjuangan, **MENYETUJUI** usulan rancangan perda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, untuk kemudian segera dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait rancangan perda-perda tersebut.

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,

Demikian penyampaian Pandangan Umum dari Fraksi PDI Perjuangan, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, jika ada penyampaian kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Aamiin..Aamiin..Yarobbal allamin..

Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka....Merdeka....Merdeka....

**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA

JASMANI



SEKERTARIS


WIDODO SH.

PANDANGAN UMUM
FRAKSI DEMOKRAT HANURA
ATAS
RAPERDA PERUBAHAN APBD TA. 2023 DAN
RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH



DEMOKRAT – HANURA
DPRD KABUPATEN REMBANG
REMBANG, SENIN 25 SEPTEMBER 2023

DIBACAKAN OLEH :



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT-HANURA**

Jl. Diponegoro No. 88 RembangTelp. (0295) 691194

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI DEMOKRAT – HANURA
ATAS**

**RAPERDA PERUBAHAN APBD TA. 2023 DAN RAPERDA TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

SENIN, 25 SEPTEMBER 2023

DIBACAKAN OLEH :

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Kami Hormati,

Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Yang Terhormat,

Saudara Sekretaris Daerah, Staff Ahli Bupati, Asisten Sekda dan Kepala
Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Bagian Camat Se Kabupaten Rembang

Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayahnya sehingga sampai saat ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang tentang Raperda Perubahan APBD TA. 2023 dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan apapun.

Kami fraksi Demokrat melihat kondisi RAPBD perubahan ini bukan hanya perubahan biasa tetapi APBD perubahan yang luar biasa karena terdapat defisit **SILPA** sebesar 143M ditambah kegiatan yang sifatnya wajib tetapi belum dianggarkan full serta KPU yang 20m. Harusnya Pemkab setelah adanya LHP Bpk RI segera mungkin mencari jalan keluar untuk menangani defisit tersebut sehingga tidak berakibat amburadul seperti ini. Ini seolah pemkab anggaranya baik2 saja sehat2 saja seperti yg di sampaikan Bupati di media akan tetapi malah sebaliknya para OPD tidak bisa bernapas karena anggaranya habis praktis dengan pengurangan 70 persen disaat bulan Agustus atau di triwulan 3. Kegiatan yang terkadang tidak prioritas malah terus di tayangkan atau dijalankan tanpa mikir nanti kegiatan yg sifatnya prioritas yg belum jalan akan tidak kebagian anggaran. DPRD atau banggar sudah rapat 19x untuk mencari solusi dan jalan keluar persoalan defisit salah satunya kita minta cut off semua kegiatan kecuali gaji, kegiatan pelayanan publik, dll. Kegiatan dilakukan apabila sudah ada jalan keluar terkait defisit. Akan tetapi pemkab tidak mengindahkannya. Kami fraksi Demokrat juga melihat tim TAPD tidak kompak dan tidak solid sehingga kebijakan banyak yg tidak sigkron bahkan yg disampaikan terkadang menyesatkan

Sidang Paripurna yang Kami Hormati,

Mencermati penghantaran dan penjelasan saudara Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan APBD TA. 2023 dan Pajak daerah dan Retribusi Daerah, maka iijinkan kami untuk menyampaikan pertanyaan, pernyataan maupun usulan terhadap raperda di maksud sebagai berikut :

1. Raperda Perubahan APBD TA. 2023

- a. Dalam rancangan perubahan APBD tahun 2023 PAD direncanakan sebesar **Rp. 375.067.739.753,-** tetapi ada penurunan sebesar **Rp. 2.195.751.247,-** dari APBD induk Tahun 2023. Tapi Fraksi Demokrat Hanura masih melihat OPD terkait yang acara estimasinya hanya mampu memenuhi 60% dari target yang diberikan. Untuk itu kami dari Fraksi Demokrat Hanura ingin mempertanyakan bagaimana solusi Pemda agar APBD tidak lebih besar pasak dari pada tiang. Sehingga pelaksanaan APBD tahun 2023.
- b. Pada APBD tahun 2023 di DPU khususnya diprogram penyelenggaraan jalan ada anggaran sebesar **Rp 26.550.000.000,-** yg digeser untuk kegiatan penyelenggaraan jalan yg putus kontrak tahun 2022. Sehingga banyak ruas jalan yang sudah

Demokrat - Hanura meminta kejelasan langkah yg diambil untuk memperbaiki jalan yg dilakukan penggeseran itu semakin rusak parah . Karena kami melihat anggaran perawatan rutin jalan ini tidak mengalami kenaikan di RAPBD Perubahan ini .

- c. Di dalam Perda DANA CADANGAN untuk dana Pilkada 2024 diamanahkan bahwa pada tahun 2023 ini Pemda harus menganggarkan Rp 20 M tapi kenyataannya hanya dianggarkan sekitar Rp 16M an. Apakah ini tidak menyalahi amanat perda? Mohon penjelasan!

2. Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pengawasan dan penegakan hukum di bidang pajak dan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan wajib retribusi karena masih banyak para wajib pajak dan wajib retribusi yang kurang kooperatif terhadap Peraturan Daerah.
- b. Kreatifitas dan inovasi pemerintah daerah melalui OPD terkait harus terus dilakukan dengan menghadirkan kemudahan akses dalam pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah dan retribusi daerah, serta memastikan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah adalah dalam rangka pembangunan daerah, sehingga masyarakat meyakini bahwa apa yang mereka keluarkan akan kembali manfaatnya kepada mereka dengan adanya pembangunan sampai ke pelosok-pelosok desa dan perkampungan.
- c. rancangan yang ada harus mampu mengakomodasi peningkatan PAD disatu sisi dan mampu memberikan iklim usaha kepada masyarakat secara luas disisi lain, sehingga pajak daerah dan retribusi daerah tidak semata-mata dioreintasikan pada besaran PAD tetapi lebih jauh adalah nilai kemanfaatan yang bermuara pada percepatan kesejahteraan rakyat.

Sidang Paripurna yang Kami Hormati,

Demikian pandangan umum Fraksi Demokrat – Hanura ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan kami ucapkan Terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab membangun masyarakat Bangsa dan Negara.

Terimakasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 25 September 2023

FRAKSI DEMOKRAT - HANURA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA

SEKRETARIS



MUGIARTO S.T



DUMADIYONO, S.H.

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA (F-KIS)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Terhadap

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Tentang

**PENJELASAN BUPATI ATAS
PERUBAHAN APBD REMBANG TAHUN 2023
&
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Rembang

Hari Kamis, 25 September 2023
Juru Bicara: **SAHNINGSIH, S.E.**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Staf Ahli Bupati Rembang
- Yang kami hormati Asisten I, II, dan III Sekda Rembang
- Yang kami hormati Kepala Badan / Dinas / Instansi / Kantor / Bagian se-Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Camat se-Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang dan jajarannya.
- Yang kami hormati rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati, serta segenap Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Mengawali penyampaian Pandangan Fraksi kali ini, perkenankanlah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Alloh SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua. Sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini.

Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaat-nya di Yaumil Akhir nanti.

Perkenankanlah kami mengucapkan Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad S.A.W yang akan jatuh pada hari Kamis tanggal 28

September 2023 Masehi. "Maulid Nabi adalah hari untuk merenungkan keadilan, kasih sayang, dan kepedulian yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mengikuti jejak-Nya."

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Mendengar penjelasan atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan oleh Sdr. Bupati.

Fraksi KIS sangat mengapresiasi atas segala daya upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab atas kinerjanya., meskipun dalam situasi APBD yang sedang tidak baik-baik saja Pemerintah bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat.

Kami telah mendengar dan menyimak pengantar nota keuangan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Oleh karena itu iijinkan kami Fraksi Karya Indonesia Sejahtera menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD kabupaten Rembang Tahun 2023 dan Raperda Tentang Pajak dan retribusi daerah.

Beberapa hal yang kami mintakan penjelasan dan harapan kepada pemerintah antara lain :

A. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023

1. Sesuai dengan laporan realisasi APBD Kabupaten Rembang sampai dengan Bulan Agustus 2023 dan data diterima tanggal 14 September 2023 bahwa untuk Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) capaiannya baru sebesar 21,11 % dari Angkat Target yang

terpasang di Perda APBD sebesar 377,26 M dan baru tercapai sebesar 79,64 M. Padahal sudah Bulan Agustus, Sementara sisa waktu tinggal 4 bulan lagi dan masih kurang 297,62 Milyard. Apa yang menyebabkan lambatnya capaian PAD tersebut dan solusinya bagaimana? Apakah PAD bisa tercapai sampai di Bulan Desember? Berapa persen potensi maksimal capaiannya? Karena hal ini sangat penting bagi pelaksanaan APBD di Kabupaten Rembang, jangan sampai pendapatan kita tidak tercapai yang berakibat pada belanja kita, kemungkinan ada pekerjaan yang gagal bayar atau ada pekerjaan/ kegiatan yang tidak ada Anggaranya. Mohon penjelasan!

2. Dalam Struktur APBD Perubahan tahun 2023 yang telah tertuang dalam nota pengantar Bupati disampaikan bahwa ada penurunan Pendapat Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Retribusi Daerah sebesar 54 Juta dan penurunan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar 2,14 Milyar. Apa yang menyebabkan penurunan pendapatan tersebut? Mohon penjelasan!
3. Dalam Belanja pada pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin ada kenaikan Anggaran sebesar 15, 4 Milyar dan Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi sebesar 41,8 Milyar. Progres pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD sampai saat ini masih kurang memuaskan, karena prosentase masih terbilang sedikit karena berbagai persoalan, sementara di APBD Perubahan ini ada tambahan anggaran begitu besar dengan waktu yang tersedia relatif pendek, karena pada APBD Perubahan ini disahkan pada akhir September, dilanjutkan dengan proses evaluasi Gubernur,

bagaimana strategi pelaksanaan yang diterapkan oleh pemerintah agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang akan kita sepakati? Apakah semua kegiatan bisa selesai sampai diakhir tahun? Mohon penjelasan!

B. RAPERDA TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

1. Dengan hadirnya perubahan Raperda dan Retribusi Daerah ini diharapkan bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat serta bisa meningkatkan pendapatan asli Daerah yang bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang. Berapa proyeksi perolehan pajak dan retribusi Daerah setelah adanya Perubahan Perda Tersebut. Mohon disampaikan perolehan pajak daerah dan retribusi daerah dalam 5 tahun terakhir sebagai evaluasi pendapatan ditahun mendatang. Mohon penjelasan!
2. Tidak tercapainya target PAD sangat berpengaruh terhadap belanja yg dilakukan. Dengan adanya raperda ini diharapkan semua target PAD dapat dipenuhi bahkan bisa melebihi.
3. Dibutuhkan komitmen yg tinggi berlakunya perda ini, maka dibutuhkan peraturan pelaksanaannya agar regulasi ini dapat efektif dijalankan.
4. Penyesuaian pajak dan retribusi ini hendaknya tetap memperhatikan ekosistem investasi dan usaha umkm yang ada.

Menutup Pandangan Fraksi KIS ini mari kita berdoa semoga kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa bekerja menunaikan semua amanah kita.

Bila ada kata-kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pandangan Fraksi Karya Indonesia Sejahtera (F-KIS) kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA (F-KIS)**

Ketua,

Sekretaris,


WIWIN WINARTO, S.H.




AGUS SUTRISNO



JAWABAN BUPATI REMBANG

ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2023

DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat :

- Saudara Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD;
- Saudara FORKOMPIMDA;
- Saudara Kepala OPD dan Camat se Kabupaten Rembang;
- Rekan-rekan Jurnalis dan perwakilan LSM serta Tamu Undangan.

Mengawali jawaban Saya atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita masih diberi nikmat, kesehatan dan kebahagiaan.

Berkenaan dengan pertanyaan, saran, pendapat dan catatan yang disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang, dapat saya jelaskan sebagai berikut :

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	<u>I. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</u>	
1.	Penyerapan APBD masih rendah atau lambat, agar penyerapan Perubahan APBD 2023 lebih keras dan lebih serius.	1 Terima kasih saran dan masukan, perihal realisasi anggaran kami perintahkan agar Kepala OPD untuk segera mengajukan proses pembayaran.
2.	Anggaran untuk memenuhi pelayanan public agar dicukupi	2 Secara proporsional anggaran mendukung pelayanan public telah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD.
3.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3 Rancangan Perda dimaksud disusun berdasarkan kajian ilmiah. Pemungutan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, yang memperoleh manfaat atas SDA lebih banyak akan dipungut lebih banyak pula
4.	Seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan dalam satu Perda.	4 Telah kami akomodir dalam satu Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	II. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
1.	Berdasarkan rapat Komisi dan rapat banggar PAD yang bersumber dari Pajak dan Retribusi daerah dipastikan tidak tercapai sehingga Pemerintah Kab. Rembang dianggap kurang teliti dalam merencanakan Target Pendapatan Asli Daerah disektor Pajak dan Retribusi	1. Harap dijadikan maklum, bahwa koreksi besaran dimaksud murni dikarenakan kondisi lapangan yang belum memberikan peningkatan yang signifikan atas realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
2.	Adanya rasionalisasi pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan sebesar Rp. 20.000.000.000,- dan pembayaran cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo sebesar Rp. 24.500.000.000,- secara otomatis membebani APBD 2024, bagaimana solusi pemkab dalam menjaga postur APBD 2024?	2. Penyesuaian dimaksud merupakan tindaklanjut hasil LHP BPK R.I atas LKPD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, sehingga Pem Kab Rembang berkewajiban untuk melaksanakan hasil LHP.
3.	Penggunaan anggaran yang tidak sesuai mengakibatkan beban anggaran baik yang bersumber dari DAK, Earmaking dsb, mohon Bapak Bupati lebih tegas dalam mengawasi penggunaan anggaran yang tidak sebagaimana mestinya.	3. Anggaran dengan sumberdana DAK maupun DAU Earmark telah dialokasikan pada masing-masing program/kegiatan sesuai dengan Juklak/Juknis.
4.	Langkah konkrit Pemkab dalam menindaklanjuti kegiatan sektor pertambangan dan hiburan yang belum berijin, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan retribusi daerah	4. Diawali dengan seluruh aktivitas usaha karena pajak tetap dipungut pajak walau belum berizin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Draft Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masyarakat Rembang, sehingga tidak membebani warga Rembang secara berlebihan.	5. Isi dari Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dirumuskan berdasarkan kajian dan analisis sesuai dengan kondisi riil masyarakat Rembang.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	<u>III. FRAKSI NASDEM</u>	
1.	Harapan agar target dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2023 dapat tercapai	1 Optimis target tersebut dapat tercapai.
2.	Penguatan ekonomi dan daya saing nilai tambah produksi pada sector perekonomian perlu mendapatkan perhatian agar omset para pedagang dan pelaku UMKM tidak terus mengalami penurunan	2 ➤ Meningkatkan SDM UMKM dan pedagang pasar untuk masuk ke e-commerce melalui pelatihan dengan mempersiapkan generasi Z untuk masuk ke segmen pasar digital. ➤ Pasar offline tetap dioptimalkan dengan meningkatkan produktifitas dan kualitas produk mulai dari perijinan, proses produksi, packaging dan pemasaran ➤ Bagi pelaku UMKM dan pedagang yang mengalami kesulitan untuk masuk e-commerce karena keterbatasan SDNM maka Pemasaran akan dilakukan melalui forum/paguyuban dan promosi-promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten .
3.	Pemda Kab. Rembang agar membuat program yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan percepatan penurunan angka kemiskinan dan penanggulangan stunting	3 Dalam Raperda tentang Perubahan APBD, keseluruhan Program-Kegiatan telah mengakomodir seluruh aspek termasuk aspek yang mendukung upaya percepatan penurunan angka kemiskinan dan penanggulangan stunting.
4.	Keterlambatan dalam pencairan APBD Induk 2023 mohon waktu pencairan yang efektif dan efisien	4 Proses pencairan kami bayarkan sesuai dengan rencana Anggaran Kas yang tersedia pada masing-masing DPA OPD.
5.	Penyerapan dan pelaksanaan program pembangunan APBD Induk 2023 perlu dioptimalkan	5 Saran dan masukan kami tindaklanjuti segera.
6.	Kami menyetujui Raperda Perubahan APBD TA 2023 untuk selanjutnya dilakukan pembahasan.	6 Terima kasih
7.	Kami mendukung Raperda Kab. Rembang tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pendukung pembangunan di kab. Rembang.	7. Terima kasih, mohon kerjasamanya agar Perda dimaksud segera ditetapkan.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
8.	Kami mendorong modernisasi proses pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan system teknologi untuk memudahkan akses pelayanan,	8. Telah kami siapkan perangkat dimaksud sehingga target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat tercapai.
9.	Peningkatan Kreatifitas dan inovasi pemda melalui OPD terkait dengan memberikan kemudahan akses dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.	9. Upaya yang kami lakukan dengan Penyiapan SDM dengan harapan mampu memberikan Kreatifitas dan inovasi pemda melalui OPD teknis.
10	Kami menerima dan menyetujui Raperda Tentang Pajak dan Retribusi untuk selanjutnya dilakukan pembahasan.	10 Terima kasih kerjasamanya.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	IV. FRAKSI PDI PERJUANGAN	
1.	Mohon Pemkab lebih meningkatkan kapasitas SDM di bidang Perbendaharaan dan Perencanaan Penyusunan serta Pengelolaan APBD agar lebih optimal dalam penyerapan	1. Saran dan masukan kami jadikan bahan Evaluasi.
2.	Pencapaian visi misi dan program prioritas daerah TA 2023. Target kinerja yang ingin dicapai dengan waktu pembahasan yang singkat.	2. Kami harapkan dukungan teman-teman legislatif dalam upaya pencapaian visi misi dan program prioritas yang telah kami jabarkan dalam dokumen RPJMD.
3.	Pemda agar melakukan pemetaan dan menyusun basis data agar mendapatkan data yang akurat dan terkini terkait Raperda pajak dan retribusi daerah.	3. Diawali dengan Penyusunan Raperda berbasis data riil baik bersumber dari BPS, OPD maupun penelitian lapangan.
4.	Kami dari Fraksi PDI Perjuangan menyetujui Raperda Perubahan APBD dan Raperda Tentang Pajak dan Retribusi untuk selanjutnya dilakukan pembahasan.	4. Terima kasih, Penetapan Raperda Perubahan APBD dan Raperda Tentang Pajak dan Retribusi Daerah akan dilakukan pembahasan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan sidang BANMUS.

#Piketi di Canyugupi.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	V. FRAKSI DEMOKRAT - HANURA	
1.	Bagaimana solusi Pemda dengan adanya penurunan PAD dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2023?	1. Harap dimaklumi, penurunan dimaksud dikarenakan adanya perubahan regulasi.
2.	Pergeseran anggaran senilai Rp. 26.550.000.000 dari program penyelenggaraan jalan yang digeser untuk kegiatan penyelenggaraan jalan yang putus kontrak tahun 2022, mohon penjelasan langkah yang diambil Pemda untuk memperbaiki jalan yang semakin rusak.	2. Secara bertahap ruas jalan yang mengalami kerusakan segera kami perbaiki.
3.	Anggaran Dana cadangan untuk dana pilkada 2024 adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,- tapi kenyataannya tahun 2023 hanya Rp. 16.000.000.000,-, apakah tidak menyalahi amanat Perda, mohon penjelasannya.	3. Secara perhitungan definitive kebutuhan dalam tahapan Pilpres/Pileg hanya sebesar Rp. 16.000.000.000.
4.	Perda tentang Pajak dan Retribusi daerah harus bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pengawasan dan penegakan hukum sehingga mampu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak karena masih banyaknya wajib pajak yang kurang kooperatif.	4. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, telah dilakukan sosialisasi dan akan selalu dilakukan sosialisasi, komunikasi dengan masyarakat. Diharapkan Pemkab dan masyarakat mengetahui arti pentingnya pajak dan retribusi daerah sebagai penopang pembangunan daerah.
5.	Kreatifitas dan Inovasi pemda melalui OPD terkait harus terus dilakukan dengan memberikan kemudahan akses dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah agar mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memastikan bahwa pajak dan retribusi daerah dimanfaatkan dalam pembangunan daerah.	5. Kerja nyata yang kami lakukan antara lain : ✓ Mendata potensi pajak melalui door to door dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di BPPKAD ✓ Memperbaiki sistem dan prosedur yang mengarah kepada sistem yang mempermudah pelayanan dan mendorong efektivitas dalam pengawasannya. ✓ Meningkatkan sinergitas antar instansi yang terkait dengan pengelolaan PAD. ✓ Bekerjasama dengan lintas

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	<u>VI. FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA</u>	
1.	Berdasarkan Laporan Realisasi APBD Kab Rembang bahwa realisasi PAD baru sebesar 21,11% dari target APBD, apakah yang menyebabkan lambatnya capaian PAD tersebut dan solusinya bagaimana? Apakah PAD dapat tercapai dan berapa potensi maksimal capaiannya?	1. Realisasi PAD sampai bulan Agustus sebesar 210 Milyar (55,82 %), berikutnya OPD Teknis selaku pemungut Pajak dan Retribusi Daerah lebih meningkatkan kinerja dengan harapan mampu memenuhi target PAD.
2.	Penyebab turunnya PAD	2. Penurunan dimaksud disebabkan dari besaran Jasa Giro dan Bunga Deposito.
3.	Bagaimana strategi pelaksanaan yang di terapkan Pem Kab Rembang atas alokasi Belanja Modal	3. Tahapan untuk pelaksanan Belanja Modal segera kami lakukan setelah Penetapan perda ttg Perubahan APBD secara pararel akan dimulai dari Proses Lelang, Pelaksanaan Pekerjaan dan Proses Pengajuan Pembayaran
4.	Dasar Evaluasi pendapatan agar disampaikan perolehan pajak dan retribusi daerah dalam 5 tahun terakhir.	4. Data dimaksud kami kirimkan dalam forum pendalaman Perubahan RAPBD 2023
5.	Tidak tercapainya target PAD berpengaruh terhadap belanja yang dilakukan	5. Untuk dimaklumi, bahwa realisasi PAD memang belum memenuhi target.
6.	Komitmen yang tinggi berlakunya Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dibutuhkan Peraturan Pelaksananya	6. Telah kami susun Draft Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.	Penyesuaian Pajak dan Retibusi hendaknya memperhatikan Ekosistem Investasi dan Usaha UMKM yang ada	7. Penyesuaian Raperda berdasarkan kajian ilmiah, sesuai peraturan perundang-undangan dan kondisi riil daerah. Dalam penyusunan juga melibatkan stakeholder yang terkait dengan obyek pajak dan retribusi daerah.

Rapat Dewan dan Hadirin yang Saya hormati,

Demikian jawaban atas pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk selanjutnya terhadap hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan secara teknis, kami mempersilahkan untuk dibahas dan diperdalam dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang.

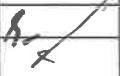
Akhirnya saya sampaikan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 25 September 2023

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Nama Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ka. BPPKAD	
Ka. Bid	

Rapat Dewan dan Hadirin yang Saya hormati,

Demikian jawaban atas pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk selanjutnya terhadap hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan secara teknis, kami mempersilahkan untuk dibahas dan diperdalam dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 25 September 2023

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RAPERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Hari : Jum'at
Tanggal : 29 September 2023
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
II. SIFAT RAPAT : Terbuka
III. ACARA RAPAT:

1. Pembukaan.
2. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023;
3. Laporan Panitia Khusus atas Pembahasan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Pendapat Fraksi-Fraksi atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Persetujuan Penetapan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Penandatanganan persetujuan bersama dan penyerahan Keputusan DPRD ;
7. Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : **H. Supadi**
2. Jabatan : **Ketua DPRD Kabupaten Rembang**

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : **Nur Purnomo Mukdiwidodo, S.IP**
2. Jabatan : **Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang**

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 7 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 8 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 4 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	: 36 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
---------------------------------	-----------

2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 1 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 1 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: - orang
Jumlah	: 9 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. Supadi

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : Saudara Bupati dan Wakil Bupati
Rembang

Yang terhormat : Pimpinan dan segenap anggota DPRD
Kabupaten Rembang

Dan yang kami hormati : Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati,
Assisten Sekda, Kepala OPD dan Camat
se Kabupaten Rembang

Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, pada hari ini Jum'at tanggal 29 September 2023 kita kembali dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, untuk melaksanakan Rapat Paripurna Kedua DPRD dalam membahas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023, dan Raperda tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa anggota DPRD Kabupaten Rembang sejumlah 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebanyak 30 orang.

Keabsahan rapat paripurna kedua ini, sama dengan ketentuan yang berlaku pada rapat paripurna pertama membahas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 25 September 2023 yaitu dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Atas dasar jumlah fisik anggota yang menghadiri rapat paripurna dan memperhatikan ketentuan yang berlaku, maka kuorum rapat paripurna kedua ini telah terpenuhi. Untuk itu dengan mengucap *"Bismillahirrohmanirrohim"* tepat pukul 11.35 WIB Rapat Paripurna Kedua dalam membahas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut, akan saya bacakan susunan acara pada rapat paripurna hari ini, adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023;
3. Laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Pendapat Akhir Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Persetujuan atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023, dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Penandatanganan Persetujuan bersama dan penyerahan surat keputusan DPRD atas Raperda;
7. Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023, dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Penutup.

Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia,

Kita ikuti acara kedua, yaitu Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023. Kepada Saudara Nur Purnomo Mukdiwidodo, S.IP. saya minta untuk menyampaikannya.

===== LAPORAN BADAN ANGGARAN =====

Terima kasih Saudara Nur Purnomo Mukdiwidodo, S.IP. atas bantuannya.

➤ *(Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 terlampir)*

✓ Interupsi Sdr H. Supadi (Fraksi PKB)

“ Maaf Pimpinan karena waktu sudah mau masuk Jum’atan , saya usul untuk rapat di skors dulu nanti dilanjutkan setelah jum’atan

✓ Pimpinan Rapat (H. Supadi)

“ Baiklah kalau begitu rapat saya skors dulu untuk jumat, kita kumpul lagi jam 12. 30”

✓ Pimpinan Rapat (H. Supadi)

“ Skors saya cabut dan rapat paripurna kita lanjutkan kembali”

Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia,

Kita masuki acara ketiga yaitu Laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kepada pimpinan Pansus atau yang ditunjuk dipersilahkan.

===== LAPORAN PANSUS =====

Terima kasih Saudara Mohammad Anshori atas bantuannya.

➤ ***(Laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terlampir)***

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Acara keempat yaitu Pendapat Akhir Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023, dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Namun sebelumnya, kepada yang ditunjuk untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi, saya minta untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : Sdr. Mohammad Ashori |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : Sdr. Supadi |
| 3. Fraksi Nasional Demokrat | : Sdr. Sustiyono |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan | : - |
| 5. Fraksi Demokrat Hanura | : Sdr. Agus Purnawan Y. A.Md. |
| 6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera | : Sdr. Puji Santoso, S.P.,M.H. |

Untuk selanjutnya, secara berurutan dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, disilahkan.

PENDAPAT AKHIR FRAKSI						
FRAKSI	Raperda Perubahan APBD			Raperda Pajak Retribusi		
	S	SDP	TS	S	SDP	TS
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	✓			✓		
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	✓			✓		
Fraksi Nasional Demokrat	✓			✓		
Fraksi PDI Perjuangan	✓			✓		
Fraksi Demokrat Hanura	✓			✓		
Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	✓			✓		

Keterangan : (S : setuju ; SDP : setuju dengan pengubahan ; TS : tidak setuju).

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita masuk acara kelima yaitu Persetujuan atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Disetujui atau tidaknya Raperda sebenarnya sudah dapat dilihat dari laporan Panitia Khusus maupun pendapat akhir dari masing-masing fraksi. Oleh karena dalam persetujuannya adalah atas dasar pengambilan keputusan dari anggota, maka saya tawarkan kepada rekan-rekan Anggota pada rapat paripurna ini.

Yang pertama :

“Apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD melalui Laporannya dapat disetujui ?”

===== SETUJU =====

Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui

(Ketuk palu 1 kali)

Yang kedua :

“Apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibahas oleh Panitia Khusus dapat disetujui ?”

===== SETUJU =====

Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Dari pemberian persetujuan oleh Anggota, selanjutnya akan dilakukan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati bersama Pimpinan DPRD terhadap Raperda, dilanjutkan dengan penyerahan Surat Keputusan DPRD kepada Bupati Rembang. Agar pelaksanaan penandatanganan persetujuan bersama dan penyerahan surat keputusan DPRD dapat berjalan baik dan lancar, saya minta kepada Sekretariat DPRD untuk memandu jalannya prosesi.

Disilahkan.

**===== PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA DAN
PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN =====**

Terimakasih kepada Sekretariat DPRD atas bantuannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Marilah kita masuki acara terakhir, yaitu Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kepada Bupati Rembang, waktu dan tempat disilahkan.

===== **PENDAPAT AKHIR BUPATI** =====

Terima kasih saudara Bupati, atas penyampiannya.

➤ (*Pendapat Akhir Bupati terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 terlampir*)

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Agenda rapat telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat paripurna hari ini. Terima kasih kepada Bupati beserta jajarannya, rekan-rekan pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretariat DPRD yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, sehingga pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023, dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah dijadwalkan.

Akhirnya dengan mengucapkan “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 14.05 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

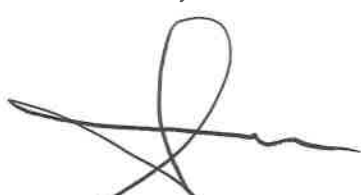
(Ketuk palu 3 kali)

Sekian,

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA ,


H. SUPADI

SEKRETARIS,


NUR PURNOMO M, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730401 199303 1 002

RETRIBUSI DAERAH

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 29 SEPTEMBER 2023
PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. SUPADI	Ketua DPRD	1	✓
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	SUMARDI	Anggota	4	
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7	
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8	
9	ABDUL ROUF	Anggota	9	
10	MUHAMMAD ANSHORI	Anggota	10	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
11	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	11	✓
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT			
19	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	24	
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota	25	

	FRAKSI PDI PERJUANGAN			
26	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	26	
27	JASMANI	Anggota	27	
28	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	28	
29	WIDODO, S.H.	Anggota	29	
30	ADI PURWOTO	Anggota	30	
31	SUMARSIH	Anggota	31	
	FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
32	H. GUNASIH, S.E	Anggota	32	
33	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	33	
34	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	34	
35	MOH NUR HASAN, S.H.M.H.	Anggota	35	
36	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	36	
37	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
38	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	38	
39	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	39	
40	AGUS SUTRISNO	Anggota	40	
41	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	41	
42	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	42	
43	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	43	
44	BASIRUN	Anggota	44	
45	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DAFTAR HADIR BUPATI , WAKIL BUPATI REMBANG DAN SEKDA REMBANG
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RAPERDA PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 29 SEPTEMBER 2023
PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1.
2	H. MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO.	Wakil Bupati Rembang	2.
3	Dr. FAHRUDIN, S.H.,M.H.,CFrA	Sekertaris Daerah	3.

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
NUR PURNOMO MUKDIWIDODO S.IP
NIP. 19730401 199303 1 002

**RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RAPERDA PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**

**HARI/TANGGAL : JUM'AT, 29 SEPTEMBER 2023
PUKUL : 09.00 WIB**

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	SIDI PRUH W.	STAF AHLI	1
2	STAF AHLI BUPATI	BUDI PRUH W.	STAF AHLI	2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA	H. Agus Salim	Asst. Sekda	5
6	ASISTEN II SEKDA	Mardi	Asst. Sekda	6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. PEMERINTAHAN	Gunari	Kabag	8
9	BAG. HUKUM	Dedy W.	Kabag	9
10	BAG. PROKOPIMDA	Hur Rohil	Kabag	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	KHOTO	Kabag	11
12	BAG. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ORGANISASI	HERI SUTJO	Kabag. Or	14
15	BAG. UMUM	Ant. fu	Kabag.	15
16	BAG. PBJ			16
17	BPPKAD	Fery Sumardi	Ka	17
18	INSPEKTORAT	Imung Tri W	Inspektur	18
19	BAPPEDA	AFAN W	Ka	19
20	DINSOSPGBK	PRADO. R		20
21	B K D	Ant. Sumardi	Ka	21
22	B P B D	Pranoto		22
23	DPU TATA RUANG	Pranoto	Kadis	23
24	DINPERKIM	Musbi		24
25	DINAS KESEHATAN	Dimi Nurmi	Kadis Pemas	25
26	DINDIKPORA	SUTRI SNO		26
27	DININDAGKOP & UMKM	Maljude	Kadis	27

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
28	DINPERINNAKER	Bni Martyo	Kadim	28
29	DINTANPAN	Idon R	Ekudin	29
30	DINLUTKAN	Cholih	KADIN	30
31	DINKOMINFO			31
32	DINAS PERHUBUNGAN	DNP/2020	Kasus	32
33	DINAS DUKCAPIL			33
34	DINPERMADES	Sumet Haps	Kadis	34
35	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Murtan	Kasus	35
36	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rendy M.	Kasus	36
37	BADAN KESBANGPOL	Shan'joo	Selfa	37
38	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	Alf Bayu Muly	Ekudin	38
39	DINAS PMPTSP			39
40	RSUD dr. R. SUTRASNO			40
41	SATPOL PP	Ekudin Luv	Kasus	41
42	BPPKAD REMBANG	SUMARNI		42
43	Radio CBFM	Rendy		43
44	Pedar Kudus	Vachri		44
45	Eki M. F.			45
46	Carlos T.D.			46
47	M. Kurniawan/Humas	M. Kurniawan		47
48	Suyarto	Suyarto	Kabag	48
49	Bag Kesi			49
50				50
51				51
52				52
53				53
54				54
55				55
56				56
57				57
58				58

**DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG**

**TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RAPERDA PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 29 SEPTEMBER 2023

PUKUL : 09.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	Baleeb ag serya	1
2	CAMAT KALIORI	A. Folik	2
3	CAMAT SUMBER	Aza. Suben	3
4	CAMAT SULANG	Maruli Dwi R	4
5	CAMAT BULU	Moeh Solih	5
6	CAMAT PAMOTAN	Rotingi. Ht.	6
7	CAMAT GUNEM	Ariyanto TM	7
8	CAMAT SALE		8
9	CAMAT LASEM		9
10	CAMAT PANCUR	Karlman	10
11	CAMAT SEDAN	Harjah	11
12	CAMAT SLUKE	M. Anjin	12
13	CAMAT KRAGAN		13
14	CAMAT SARANG		14



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

NUR PURNOMO MUKDIWIDODO S.IP

NIP. 19730401 199303 1 002

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
60				60
61				61
62				62
63				63
64				64
65				65
66				66
67				67
68				68
69				69
70				70



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

NUR PURNOMO MUKDIWIDODO S.IP
NIP. 19730401 199303 1 002



LAPORAN

**BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM
RAPAT PARIPURNA HARI JUMAT TANGGAL 29
SEPTEMBER 2023 ATAS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
2023**

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RAPAT PARIPURNA HARI JUMAT TANGGAL 29 SEPTEMBER 2023
MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat,

- Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Yang saya hormati

- Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Staf Ahli Bupati Rembang
- Asisten I, II, III Sekda Kabupaten Rembang
- Kepala Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Bagian Setda Kab.Rembang
- Camat se-Kabupaten Rembang

Berikut kami bacakan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang atas Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

I. PENDAHULUAN :

1. bahwa Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebelum disepakati menjadi Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD dan TAPD;
2. bahwa hasil pembahasan Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun 2023 dilaporkan oleh Badan Anggaran pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

II. D A S A R.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023
14. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
15. Surat Bupati Rembang Nomor 188.3/5302/2023 tanggal 22 September 2023 perihal Berita Daerah Pengiriman Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023;
16. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dengan TAPD Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 13 September 2023 yang mengagendakan Penjadwalan Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023.

III. PELAKSANAAN

a. Rapat Paripurna I dilakukan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 25 September 2023

Jam : 10.00 WIB

Acara : - Penjelasan Bupati terhadap Raperda Perubahan APBD

TA. 2023

- Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas penjelasan Bupati
- Jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi

- b. Rapat Banggar bersama TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada :
 - Hari : Senin
 - Tanggal : 25 September 2023
 - Jam : 13.00 WIB
 - Acara : Penjelasan lanjutan atas Raperda Perubahan APBD TA. 2023
- c. Rapat Banggar bersama TAPD, serta OPD Kabupaten Rembang dilakukan pada :
 - Hari : Senin - Selasa
 - Tanggal : 25 - 26 September 2023
 - Jam : 15.00 WIB
 - Acara : Pendalaman terhadap Raperda tentang Perubahan APBD TA. 2023
- d. Rapat Banggar bersama TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada :
 - Hari : Selasa
 - Tanggal : 26 September 2023
 - Jam : 13.00 WIB
 - Acara : Sinkronisasi atas Raperda Perubahan APBD TA. 2023
- e. Rapat Banggar bersama TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada :
 - Hari : Rabu
 - Tanggal : 26 September 2023
 - Jam : 10.00 WIB
 - Acara : Sinkronisasi atas Raperda Perubahan APBD TA. 2023
- f. Rapat Banggar Internal Kabupaten Rembang dilakukan pada :
 - Hari : Rabu
 - Tanggal : 27 September 2023
 - Jam : 13.00 WIB
 - Acara : Penyusunan laporan pembahasan Raperda Perubahan APBD TA. 2023
- g. Rapat Fraksi dilakukan pada :
 - Hari : Rabu
 - Tanggal : 27 September 2023
 - Jam : 13.00 WIB
 - Acara : Menyusun Pendapat Fraksi atas Raperda Perubahan APBD TA. 2023

IV. HASIL RAPAT

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Adapun ringkasannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

RINGKASAN RAPBD PERUBAHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Induk 2023	RAPBD P 2023	Bertambah / (Berkurang)	Pembahasan	
					Menjadi	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 4
4	PENDAPATAN DAERAH	1.935.562.481.000	1.958.738.889.150	23.176.408.150	1.950.139.297.156	(8.599.591.994)
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	377.263.491.000	375.067.739.753	(2.195.751.247)	387.567.739.753	12.500.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	155.124.585.000	155.124.585.000	-	155.124.585.000	-
4.1.02	Retribusi Daerah	33.524.500.000	33.524.500.000	-	33.524.500.000	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.212.500.000	20.212.500.000	-	20.212.500.000	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	168.401.906.000	166.206.154.753	(2.195.751.247)	178.706.154.753	12.500.000.000
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.555.198.990.000	1.581.571.152.297	26.372.162.297	1.560.471.560.303	(21.099.591.994)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.419.064.752.000	1.433.373.914.297	14.309.162.297	1.414.224.322.303	(19.149.591.994)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	136.134.238.000	148.197.238.000	12.063.000.000	146.247.238.000	(1.950.000.000)
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.100.000.000	2.099.997.100	(1.000.002.900)	2.099.997.100	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.100.000.000	2.099.997.100	(1.000.002.900)	2.099.997.100	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.935.562.481.000	1.958.738.889.150	23.176.408.150	1.950.139.297.156	(8.599.591.994)
5	BELANJA	2.037.558.436.782	2.002.908.101.424	(34.650.335.358)	2.005.856.130.956	2.948.029.532
	Jumlah Belanja	2.037.558.436.782	2.002.908.101.424	(34.650.335.358)	2.005.856.130.956	2.948.029.532
	Total Surplus/(Defisit)	(101.995.955.782)	(44.169.212.274)	57.826.743.508	(55.716.833.800)	(11.547.621.526)
6	PEMBIAYAAN					-
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	171.995.955.782	69.669.212.274	(102.326.743.508)	69.669.212.274	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	171.995.955.782	28.562.969.761	(143.432.986.021)	28.562.969.761	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	41.106.242.513	41.106.242.513	41.106.242.513	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	171.995.955.782	69.669.212.274	(102.326.743.508)	69.669.212.274	-

6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						70.000.000.000	25.500.000.000	(44.500.000.000)	13.952.378.474	(11.547.621.526)
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan						20.000.000.000	-	(20.000.000.000)	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah						-	-	-	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo						50.000.000.000	25.500.000.000	(24.500.000.000)	13.952.378.474	(11.547.621.526)
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						-	-	-	-	-
	JumlahPengeluaranPembiayaan						70.000.000.000	25.500.000.000	(44.500.000.000)	13.952.378.474	(11.547.621.526)
	Pembiayaan Netto						101.995.955.782	44.169.212.274	(57.826.743.508)	55.716.833.800	11.547.621.526
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan						-	-	-	-	-

Rincian Kerja Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Induk 2023	RAPBD P 2023	Bertambah / (Berkurang)	Pembahasan	
					Menjadi	Bertambah/ (Berkurang)
6	PEMBIAYAAN	101.995.955.782	44.169.212.274	(57.826.743.508)	55.716.833.800	-
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	171.995.955.782	69.669.212.274	(102.326.743.508)	69.669.212.274	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	171.995.955.782	28.562.969.761	(143.432.986.021)	28.562.969.761	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	41.106.242.513	41.106.242.513	41.106.242.513	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	171.995.955.782	69.669.212.274	(102.326.743.508)	69.669.212.274	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	70.000.000.000	25.500.000.000	(44.500.000.000)	13.952.378.474	-
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	-	(20.000.000.000)	-	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	50.000.000.000	25.500.000.000	(24.500.000.000)	13.952.378.474	(11.547.621.526,00)
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000.000	25.500.000.000	(44.500.000.000)	13.952.378.474	-
	Pembiayaan Netto :	101.995.955.782	44.169.212.274	(57.826.743.508)	55.716.833.800	-

Rekapitulasi Rencana Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

INDUK 2023										
NO	OPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH				PENDAPATAN TRANSFER		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Pendapatan Hibah	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		50.000.000							50.000.000
2	DINAS KESEHATAN		45.000.000		158.974.906.000					159.019.906.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		5.345.000.000		30.000.000					5.375.000.000
4	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		210.000.000							210.000.000
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		600.000.000							600.000.000
6	DINAS PERHUBUNGAN		2.319.500.000							2.319.500.000
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		75.000.000							75.000.000
8	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		1.190.000.000							1.190.000.000
9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		15.500.000.000							15.500.000.000
10	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH		7.760.000.000		82.000.000					7.842.000.000
11	SETDA		300.000.000							300.000.000
12	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	155.124.585.000	130.000.000	20.212.500.000	9.315.000.000	1.419.064.752.000	136.134.238.000	3.100.000.000	-	1.743.081.075.000
	JUMLAH	155.124.585.000	33.524.500.000	20.212.500.000	168.401.906.000	1.419.064.752.000	136.134.238.000	3.100.000.000	-	1.935.562.481.000

Rekapitulasi Rencana Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RAPBD P 2023											
NO	OPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH					PENDAPATAN TRANSFER		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		JUMLAH
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Pendapatan Hibah	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		50.000.000							50.000.000	
2	DINAS KESEHATAN		45.000.000		158.974.906.000					159.019.906.000	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		5.345.000.000		30.000.000					5.375.000.000	
4	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		210.000.000							210.000.000	
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		600.000.000							600.000.000	
6	DINAS PERHUBUNGAN		2.319.500.000							2.319.500.000	
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		75.000.000							75.000.000	
8	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		1.190.000.000							1.190.000.000	
9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		15.500.000.000							15.500.000.000	
10	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH		7.760.000.000		82.000.000					7.842.000.000	
11	SETDA		300.000.000							300.000.000	
12	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	155.124.585.000	130.000.000	20.212.500.000	7.119.248.753	1.433.373.914.297	148.197.238.000	2.099.997.100	-	1.766.257.483.150	
	JUMLAH	155.124.585.000	33.524.500.000	20.212.500.000	166.206.154.753	1.433.373.914.297	148.197.238.000	2.099.997.100	-	1.958.738.889.150	

Rekapitulasi Rencana Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

BERTAMBAH / BERKURANG										
NO	OPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH				PENDAPATAN TRANSFER			LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Pendapatan Hibah	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	JUMLAH
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SETDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	(2.195.751.247)	14.309.162.297	12.063.000.000	(1.000.002.900)	-	23.176.408.150
	JUMLAH	-	-	-	(2.195.751.247)	14.309.162.297	12.063.000.000	(1.000.002.900)	-	23.176.408.150

Rekapitulasi Rencana Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

PEMBAHASAN										
NO	OPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH				PENDAPATAN TRANSFER			LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
		Pejak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelaaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Pendapatan Hibah	Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	JUMLAH
1	2	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		50.000.000							50.000.000
2	DINAS KESEHATAN		45.000.000		171.474.906.000					171.519.906.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		5.345.000.000		30.000.000					5.375.000.000
4	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		210.000.000							210.000.000
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		600.000.000							600.000.000
6	DINAS PERHUBUNGAN		2.319.500.000							2.319.500.000
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		75.000.000							75.000.000
8	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		1.190.000.000							1.190.000.000
9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		15.500.000.000							15.500.000.000
10	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH		7.760.000.000		82.000.000					7.842.000.000
11	SETDA		300.000.000							300.000.000
12	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	155.124.585.000	130.000.000	20.212.500.000	7.119.248.753	1.414.224.322.303	146.247.238.000	2.099.997.100	-	1.745.157.891.156
	JUMLAH	155.124.585.000	33.524.500.000	20.212.500.000	178.706.154.753	1.414.224.322.303	146.247.238.000	2.099.997.100	-	1.950.139.297.156

Rekapitulasi Rencana Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

NO	OPD	BERTAMBAH / (BERKURANG)									
		PENDAPATAN ASLI DAERAH				PENDAPATAN TRANSFER		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Keayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Pendapatan Hibah	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	JUMLAH	
1	2	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	12.500.000.000	-	-	-	-	12.500.000.000	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	SETDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	(19.149.591.994)	(1.950.000.000)	-	-	(21.099.591.994)	
	JUMLAH	-	-	-	12.500.000.000	(19.149.591.994)	(1.950.000.000)	-	-	(8.599.591.994)	

Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

NO	OPD	Induk 2023	RAPBD P 2023	Bertambah / (Berkurang)	PEMBAHASAN	
					Menjadi	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	3	4	5	6 = 5-4
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	595.143.899.697	582.150.100.335	(12.993.799.362)	582.260.100.335	110.000.000
2	DINAS KESEHATAN	341.164.858.421	371.002.318.142,00	29.837.459.721	381.321.541.286	10.319.223.144
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	167.158.167.800	186.062.259.281	18.904.091.481	185.562.259.281	(500.000.000)
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.123.677.700	10.956.996.484	833.318.784	11.106.996.484	150.000.000
5	SATPOL PP	10.013.785.100	9.201.719.158	(812.065.942)	9.201.719.158	-
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11.489.130.700	9.640.085.502	(1.849.045.198)	9.640.085.502	-
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	25.259.132.300	23.992.749.486	(1.266.382.814)	24.202.749.486	210.000.000
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	62.451.202.150	57.837.076.279	(4.614.125.871)	58.077.076.279	240.000.000
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14.901.130.450	14.508.971.930	(392.158.520)	14.508.971.930	-
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	7.241.145.100	5.899.655.062	(1.341.490.038)	5.899.655.062	-
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.608.194.300	9.914.909.259	(1.693.285.041)	9.994.909.259	80.000.000
12	DINAS PERHUBUNGAN	25.028.385.600	22.168.303.718	(2.860.081.882)	22.218.303.718	50.000.000
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.153.370.900	6.754.859.145	(1.398.511.755)	6.754.859.145	-
14	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.376.522.800	4.233.326.557	(1.143.196.243)	4.233.326.557	-
15	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	20.622.681.600	11.247.634.823	(9.375.046.777)	11.247.634.823	-
16	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.616.001.000	3.999.782.092	(616.218.908)	3.999.782.092	-
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	17.127.408.500	15.206.252.372	(1.921.156.128)	15.286.252.372	80.000.000
18	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	27.848.681.300	19.464.112.516	(8.384.568.784)	19.364.112.516	(100.000.000)
19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	8.921.917.600	7.583.970.060	(1.337.947.540)	7.563.970.060	(20.000.000)
20	SEKRETARIAT DAERAH	82.653.294.500	77.094.856.679	(5.558.437.821)	77.079.856.679	(15.000.000)

NO	OPD	Induk 2023	RAPBD P 2023	Bertambah / (Berkurang)	PEMBAHASAN	
					Menjadi	Bertambah / (Berkurang)
21	SEKRETARIAT DPRD	60.227.245.000	56.760.188.649	(3.467.056.351)	56.270.188.649	(490.000.000)
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.289.442.600	5.684.911.984	(1.604.530.616)	5.684.911.984	-
23	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	433.700.091.114	412.326.206.332,0	(21.373.884.782)	405.260.012.720	(7.066.193.612)
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8.799.209.600	7.154.562.115	(1.644.647.485)	7.154.562.115	-
25	INSPEKTORAT	11.522.548.600	7.296.254.354	(4.226.294.246)	7.296.254.354	-
26	KECAMATAN REMBANG	8.711.423.000	7.636.178.962	(1.075.244.038)	7.636.178.962	-
27	KECAMATAN KALIORI	2.428.118.600	2.100.259.727	(327.858.873)	2.100.259.727	-
28	KECAMATAN SULANG	2.802.911.500	2.420.439.282	(382.472.218)	2.420.439.282	-
29	KECAMATAN SUMBER	2.959.855.600	2.637.426.598	(322.429.002)	2.637.426.598	-
30	KECAMATAN BULU	2.247.986.100	1.873.879.592	(374.106.508)	1.873.879.592	-
31	KECAMATAN LASEM	3.184.873.700	2.680.119.694	(504.754.006)	2.680.119.694	-
32	KECAMATAN PANCUR	2.886.235.000	2.282.337.401	(603.897.599)	2.282.337.401	-
33	KECAMATAN SLUKE	3.586.616.400	2.262.760.998	(1.323.855.402)	2.262.760.998	-
34	KECAMATAN PAMOTAN	2.642.547.000	2.192.790.144	(449.756.856)	2.192.790.144	-
35	KECAMATAN GUNEM	2.365.027.900	1.806.847.714	(558.180.186)	1.806.847.714	-
36	KECAMATAN SALE	2.299.765.400	1.819.126.765	(480.638.635)	1.819.126.765	-
37	KECAMATAN KRAGAN	2.532.121.700	2.175.389.709	(356.731.991)	2.175.389.709	-
38	KECAMATAN SEDAN	2.459.298.100	2.030.009.204	(429.288.896)	2.030.009.204	-
39	KECAMATAN SARANG	2.697.873.100	2.079.211.873	(618.661.227)	2.079.211.873	-
40	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN	15.312.659.250	28.769.261.447	13.456.602.197	28.669.261.447	(100.000.000)
	JUMLAH	2.037.558.436.782	2.002.908.101.424	(34.650.335.358)	2.005.856.130.956	2.948.029.532

V. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Sekian,

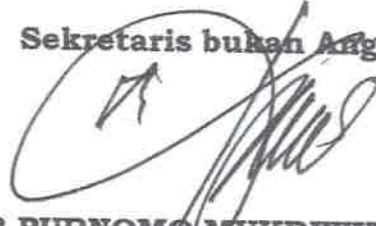
Wassalamu alaikum wr.wb

Rembang, 29 September 2023

**BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



Sekretaris bukan Anggota,


NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, SIP

Pembina Tk.I

NIP. 19730401 199303 1 002



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

LAPORAN

HASIL KERJA PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. Dasar :

1. Pasal 75 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.
2. Pembentukan Panitia Khusus membahas Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Rapat Paripurna tanggal 25 September 2023.
3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang membahas Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan Susunan Keanggotaan sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs.H.MUH.SUBAWOTO	KETUA
2	MOHAMMAD ANSHORI, S.H.	WAKIL KETUA
3	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI, S.Pd	ANGGOTA
4	SUMARDI	ANGGOTA
5	JOKO SUWITO,S.E.	ANGGOTA
6	MAHMUDI	ANGGOTA
7	MASHADI, S.Pd..M.M	ANGGOTA
8	YATIN ABDUL ZAENAL	ANGGOTA
9	SUMARSIH	ANGGOTA
10	ADI PURWOTO	ANGGOTA
11	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	ANGGOTA
12	DUMADIYONO, S.H.	ANGGOTA
13	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I	ANGGOTA
14	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA
15	ANJAR KRINIAWAN, S. T	ANGGOTA

B. Pelaksanaan Pembahasan.

- 1. Rapat kerja Panitia Khusus DPRD bersama OPD terkait pada tanggal 26 September 2023
- 2. Studi Banding Panitia Khusus ke DPRD Kabupaten Bantul pada tanggal 25 s/d 27 September 2023 dalam rangka mencari referensi.
- 3. Rapat Internal Pansus tanggal 27 September 2023
- 4. Rapat Pimpinan Pansus dengan Bapemperda tanggal 27 September 2023

C. Hasil Pembahasan :

Dari hasil pembahasan terhadap Raperda, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perubahan. :

- 1. BAB I Ketentuan Umum
 - angka 5
Definisi Pejabat untuk disesuaikan dengan PP 35 Tahun 2023, sehingga berbunyi : Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Angka 69
Definisi untuk disesuaikan dengan PP 35 Tahun 2023 sehinga berbunyi Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
- 2. Lampiran II Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum.
pada huruf B Retribusi Pelayanan Kebersihan, ada tambahan :
 - Pemanfaatan tempat pengelolaan air limbah dan pemrosesan akhir air limbah

No	Kapasitas	Tarif
1.	2.000 Liter	150.000
2.	4.000 Liter	225.000

3. Lampiran III STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

- Huruf E Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga diubah menjadi :

1. Tempat rekreasi dan pariwisata

No.	Uraian/Obyek Wisata	Peruntukan	satuan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Kolam Renang Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang			
	a. Dewasa		Per Orang	8.000
	b. Anak anak		Per Orang	7.000
2	Tiket Masuk Taman Rekreasi Pantai Kartini : a. hari biasa b. hari minggu/besar c. aprilan/syawalan		Per Orang	3.000
			Per Orang	3.500
			Per Orang	5.000
3.	Kios Pujasera TRP Kartini		Per Kios Per bulan	150.000
4.	Kios selain TRP Kartini - Bonang - Bulu Mantingan		Per Kios	400.000
			Per Tahun	365.000
5.	Museum Kartini (Harga Tiket Masuk) -Anak-anak -Dewasa	Rp. 3.000,- Rp. 5.000,-	Perorang	
			Perorang	
	Sewa Lahan Pelataran per meter TRP Kartini	Syawalan	Per Hari Per m2	2.000

2. Tempat olahraga

No	Objek	Tarif (Rupiah)	Keterangan
1	Stadion Krida Rembang		
	a. untuk latihan klub	250.000,00	sekali pakai/per hari
	b. untuk turnamen	400.000,00	sekali pakai/per hari
	c. event di luar olahraga/ komersil	5.000.000,00	sekali pakai/per hari
2	Halaman Stadion Krida Rembang	200.000,00	per hari
3	Gedung Olahraga Besi		
	a. lapangan voli untuk latihan	100.000,00	per hari
	b. turnamen voli	150.000,00	per hari
	c. event di luar olahraga/ komersil	500.000,00	per hari
4	Lapangan tenis Pemerintah Daerah		
	a. untuk latihan club	100.000,00	per baan per club per bulan
	b. turnamen hari libur/ besar	100.000,00	per baan per hari

- Pada Huruf F Struktur dan Besaran Tarif Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, pada angka 2 Hasil Perikanan , untuk indukan ikan dihapus.
- Pada huruf G Struktur dan Besaran tarif Pemanfaatan Aset Daerah yang Tdak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan / atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
 - Pemanfatan Gedung Sanggar Budaya berikut Bagan dihapus
 - Pemanfaatan tanah dan sarana pendukungnya, alat berat, dan kendaraan diubah menjadi pemanfaatan tanah dan sarana pendukungnya dan kendaraan

No.	Pemanfaatan Aset Daerah	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pemakaian Tanah untuk ATM		
	a. Tepi Jalan Nasional	Unit per Tahun	5.000.000
	b. Tepi Jalan Provinsi	Unit per Tahun	4.000.000

	c. Tepi Jalan Kabupaten	Unit per Tahun	3.000.000
	d. Tepi Jalan Desa	Unit per Tahun	2.000.000
2.	Pemakaian Tanah untuk Kantin/ Warung/Koperasi/Tempat Usaha Tidak Permanen/Semi Permanen		
	a. Sangat Strategis (Radius) sampai dengan 6 km dari Pusat Kota	Per m ² per Tahun	50.000
	b. Strategis (Radius lebih dari 6 s/d 9 km dari pusat kota)	Per m ² per Tahun	30.000
	c. Kurang Strategis (Radius lebih dari 9 km dari pusat kota)	Per m ² per Tahun	10.000
3.	Pemakaian Tanah untuk Kantin/ Warung/Koperasi/Tempat Usaha Permanen		
	a. Sangat Strategis (Radius sampai dengan 6 km dari Pusat Kota)	Per m ² per Tahun	80.000
	b. Strategis (Radius lebih dari 6 s/d 9 km dari Pusat Kota)	Per m ² per Tahun	60.000
	c. Kurang Strategis (Radius lebih dari 9 km dari Pusat Kota)	Per m ² per Tahun	40.000
4.	Pemakaian Bangunan untuk Kantin/Warung/Koperasi/ Pertokoan/Tempat Usaha		
	a. Tidak Sederhana	Per m ² per Tahun	200.000
	b. Sederhana	Per m ² per Tahun	90.000

No.	Uraian	Peruntukan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Tanah			
	a. Usaha komersial permanen		Per m ² per hari	100
	b. Usaha komersial tidak permanen		Per m ² per hari	500
	c. Pemasangan sarana reklame di Komplek Alun Alun		Per m ² per hari	300

2.	Bangunan Lain Milik Pemkab	Komersial	Per m ² per bulan	4.000
		Sosial & keagamaan	Per m ² per bulan	2.000
3.	Gedung Pertemuan			
	Balai Kartini Jl. Diponegoro Rembang	Hajatan	Per hari	7.500.000
		Sosial, keagamaan, dan pemerintahan	Per hari	3.500.000
		Politik	Per hari	5.000.000
		Pameran, pertemuan, pertunjukan, dan atau event komersial	Per hari	7.500.000
	Gedung Hijau Jl. Dr. Soetomo Rembang	Sosial, keagamaan, dan pemerintahan	Per hari	1.500.000
		politik	Per hari	2.000.000
		Pameran, pertemuan, pertunjukan, dan atau event komersial	Per hari	2.500.000
	Gedung Serba Guna/Aula Kec. Sulang	Hajatan	Per hari	2.500.000
		Sosial, keagamaan, dan pemerintahan	Per hari	1.500.000
		Politik	Per hari	2.000.000
		Pameran, pertemuan, pertunjukan, dan atau event komersial	Per hari	2.500.000

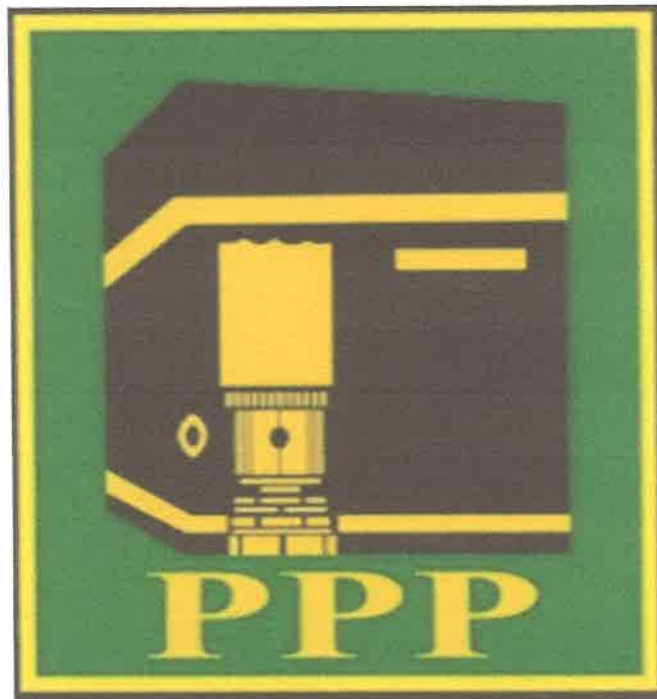
- Pemanfaatan aset daerah untuk pemasangan sarana reklame sebesar Rp250,00/m2/hari.

PENDAPAT AKHIR

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**HASIL PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2023 DAN RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN REMBANG**



**DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Hari : JUMAT, 29 SEPTEMBER 2023

Dibacakan oleh : M. ANSHORI, S.H.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212 Rembang



**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

**Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG**

PENDAPAT AKHIR

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP HASIL PEMBAHASAN

- 1. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2023**
- 2. RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jumat, 29 September 2023

Dibacakan oleh : M. ANSHORI, S.H.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Bismillah., Alhamdulillah., Assholatu Wassalamu a'la Rosulilla., Laahaula walaa quwwata illabillah..., Amma ba'da.....

Yang kami hormati :

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- => Sdr. Pimpinan dan semua anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Setda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian Setda dan Para Camat se-Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf . Dan..
- => Sdr. Pimpinan LSM, Rekan-rekan Wartawan, serta semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami melanjutkan, terlebih dahulu marilah kita, selalu memanjatkan puji dan syukur kepada ALLAH SWT, atas limpahan Rohmat, nikmat, taufik dan hidayahNYA, yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberi kesempatan hadir pada Rapat Paripurna DPRD siang hari ini, dalam keadaan sehat Wal afiat .

Sholawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita MUHAMMAD SAW.

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian Pendapat akhir kami terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang tahun 2023, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Setelah mendengarkan jawaban dan penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh Sdr. Bupati, pada Rapat Paripurna ke I, hari Senin lalu, tanggal 25 September 2023, terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi, yang selanjutnya dilakukan Penjelasan, Pendalaman dan Pembahasan oleh TAPD bersama Banggar DPRD.

Dan pada jadwal yang bersamaan juga dilaksanakan Rapat Pansus bersama OPD terkait, untuk membahas Raperda Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Alhamdulillah semua kegiatan berjalan lancar, dan akhirnya dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang direncanakan.

Terhadap jerih payah dan kerja keras Teman-teman Banggar bersama TAPD dan Rekan-rekan Pansus, dalam melakukan pembahasan, kami memberikan apresiasi dan mengucapkan rasa terima kasih yang sebanyak- banyaknya.

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang cukup, dari hasil Laporan Banggar DPRD, atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, tentang Perubahan APBD tahun 2023. dan laporan Pansus tentang hasil pembahasan Raperda Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Rembang. Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan,

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrochiim, menerima dan menyetujui :

1. **RAPERDA** Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, menjadi **PERDA** Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan segala perubahan dan pergeseran yang ada dalam pembahasannya.
2. **RAPERDA** Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, menjadi **PERDA** Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Dan di dalam Pendapat akhir ini, Kami menyampaikan masukan sebagai berikut :

A. TERKAIT RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 :

1. Mengingat sisa waktu efektif untuk pelaksanaan APBD Perubahan tahun 2023, yang tinggal 76 hari kalender, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mendorong agar Pemkab Rembang selalu bekerja extra keras, supaya program sisa kegiatan yang anggaranya direncanakan dalam APBD Perubahan tahun 2023 ini, dapat benar-benar selesai dilaksanakan, baik fisik maupun kegiatan yang non fisik, sehingga progres penyerapan anggaranya juga maksimal, sesuai dengan apa yang kita harapkan.
2. Terkait dengan target PAD yang masih belum terpenuhi, Kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mendorong agar Pemkab melalui OPD terkait, tetap melakukan upaya penggalan pendapatan daerah sesuai dengan sumber obyek yang ada.

B. TERKAIT DENGAN RAPERDA TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH :

1. Mengingat Perda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini pada awal tahun 2024 harus sudah diberlakukan, maka setelah disyahrkannya, agar segera ditindak lanjuti dengan menerbitkan Perkadanya.
2. Untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor Pajak maupun Retribusi Daerah, Pemkab harus menyediakan sarana prasarana, khususnya jembatan timbang yang ditempatkan pada titik strategis, yang berkapasitas cukup sehingga dapat dipergunakan kendaraan truk tronton bermuatan, guna menjangkau pemungutan pajak retribusinya.
3. Dalam melakukan penertiban pungutan Pajak dan Restribusi Daerah, Pemkab harus melakukan kerja sama dengan pihak aparat terkait, agar semua pengusaha pertambangan dapat melakukan kewajibannya untuk membayar pajak retribusi, dan upaya tersebut juga untuk meminimalisir dan mengatisipasi penyimpangan serta kebocoran.

Demikian Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023, dan Raperda Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Rembang.

Semoga kita semua selalu diberi hidayah dan kemudahan, sehingga apa yang kita lakukan dapat berhasil maksimal, dan bermanfaat untuk warga Masyarakat serta Pemerintah Kabupaten Rembang tercinta.

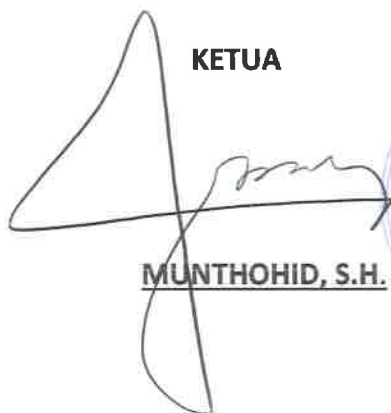
Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Billahi Taufil wal hidayah..., Wallahul Muwaffiq Ilaa aqwamitthoriik

Wassalamu' alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 29 September 2023

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA		SEKRETARIS
		
<u>MUNTHOHID, S.H.</u>		<u>H. SUNARDI, S.Pd.I</u>



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Tentang;

RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RAPERDA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Disampaikan oleh :
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang
Jum'at, 29 September 2023

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,,

Yang Terhormat, Bupati dan Wakil Bupati Kab. Rembang

Yang Kami Hormati, Ketua dan Para Wakil Ketua beserta segenap Anggota
DPRD Kab. Rembang

Yang Kami Hormati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staff Ahli Bupati dan Sekretaris
DPRD Kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang Kami Hormati, Para Pimpinan Kesatuan TNI-POLRI, Pengadilan Negeri
dan Kejaksaan Negeri Rembang.

Yang Kami Hormati, Camat seKabupaten Rembang

Yang Kami Hormati, Pimpinan Parpol, Wartawan, Pimpinan Ormas, Organisasi
Wanita, LSM Serta Undangan sekalian yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Sidang Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD Kab. Rembang atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 serta Raperda Pajak dan Retribusi dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung “Muhammad SAW” yang selalu kita tunggu safaatnya sampai yaumul kiamah, Aamiin Allah Humma Aamiin.

Hadirin sidang paripurna yang saya hormati,

Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan komitmen dan ketaatan Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, maka kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) akan menyampaikan pendapat akhir fraksi yang berisi catatan kajian, saran serta masukan terkait Raperda Perubahan APBD Tahun 2023 berdasarkan Pengantar Nota APBD Perubahan Tahun 2023 dan Pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan Tahun 2023 serta Raperda Pajak dan Retribusi Daerah secara Obyektif dan mendalam.

Namun sebelum kami menyampaikan pendapat akhir fraksi PKB, saya mewakili teman-teman fraksi PKB mengucapkan “**Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW**” semoga kita mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dan Keselamatan. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Hadirin sidang paripurna yang berbahagia,

Berdasarkan Pengantar Nota Keuangan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa percaya bahwa Rancangan APBD Perubahan Tahun 2023 telah disusun berdasarkan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang didasari skala prioritas pembangunan.

Namun setelah kami mempelajari secara seksama, kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan catatan serta masukan antara lain sebagai berikut:

➤ **Raperda Perubahan APBD TA 2023**

1. Berdasarkan Rapat Komisi dengan OPD serta Rapat Banggar dan TAPD, kami meyakini bahwa Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi daerah hampir pasti tidak akan tercapai, maka ini akan berakibat adanya belanja yang telah direncanakan tidak akan terbiayai atau bahkan gagal bayar. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten masih kurang teliti dalam merencanakan Target pendapatan asli daerah disektor pajak dan retribusi.

2. Adanya rasionalisasi pengeluaran pembiayaan pembentukan Dana Cadangan sebesar – Rp. 20.000.000.000,- dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo sebesar Rp 24.500.000.000,- secara Otomatis akan membebani APBD 2024.

Bagaimana solusi Pemkab dalam menjaga postur anggaran APBD 2024, takutnya hanya menaikkan SILPA dan Target PAD seperti yang sudah-sudah ??

3. Adanya penggunaan Anggaran yang tidak sesuai peruntukan yang berakibat beban anggaran berikutnya semakin terbebani. Baik anggaran yang berasal dari DAK, Earnmarking, dan lain sebagainya.

Mohon Bupati selaku Pelaksana pengguna Anggaran tertinggi di Kabupaten Rembang lebih Tegas dalam mengawasi penggunaan Anggaran yang tidak sebagaimana mestinya.

➤ **Raperda Pajak dan Retribusi Daerah**

Kami fraksi PKB mengapresiasi atas usulan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah mengingat masih belum Optimalnya Pajak dan Retribusi Daerah sehingga perlu adanya Payung Hukum yang jelas sesuai Kondisi riil saat ini, Disamping Apresiasi kami juga memberikan saran dan masukan antara lain sebagai berikut;

1. Masih adanya kegiatan-kegiatan sektor pertambangan dan hiburan yang masih belum berijin, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
Bagaimana langkah konkrit Pemkab dalam mengatasi permasalahan tersebut ??
2. Mohon dalam draft Rancangan Raperda Pajak dan Retribusi daerah berdasarkan regulasi yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masyarakat Rembang. Sehingga Raperda tersebut tidak membebani warga Rembang secara berlebihan dan terkesan demi meningkatkan PAD maka Pajak dan Retribusi di besarkan.

Hadirin sidang paripurna yang saya hormati,

Demikian pendapat akhir Fraksi PKB atas Raperda Perubahan APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah ini kami sampaikan. Maka dengan mengucapkan “**Bismillahirrohmannirrohim**” Kami, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa **MENERIMA DAN MENYETUJUI** Raperda Perubahan APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah di sahkan sebagai **PERDA**. Atas Perhatian dan Kerjasamanya, kami ucapkan Terima Kasih.

Akhirul kalam Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq

Wassalamualaikum Wr. Wb

Rembang, 29 September 2023
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN REMBANG


Nasirudin, S.Si
Ketua




Ilyas
Sekretaris



PENDAPAT AKHIR

**FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

- 1. PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2023**
- 2. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**



FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
1. PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2023
2. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Salam Restorasi

Gerakan Perubahan

Yth. Bupati dan Wakil Bupati Rembang;

Yth. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Staf Ahli Bupati Rembang;

Yth. Asisten I, II dan III Sekda Kabupaten Rembang;

**Yth. Kepala Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Bagian se-Kabupaten
Rembang;**

Yth. Camat se-Kabupaten Rembang;

Yth. Para Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan ridho-Nya, sehingga kita semua dapat menghadiri acara penyampaian **"Pendapat Akhir Fraksi"** dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini, kami dari Fraksi NasDem mengucapkan Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam. Sholawat serta salam marilah kita lantunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, dan semoga kita sebagai umat mendapatkan syafa'atNya di yaumul akhir. Amin Ya Robbal Alamin.

Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan para hadirin yang kami hormati.

Sebagaimana diketahui Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu Raperda strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat Kabupaten Rembang, karena APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kami telah mendengar dan menyimak pengantar nota keuangan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023. Oleh sebab itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, Kami dari Fraksi NasDem akan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan para hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya, ijinkan kami menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi NasDem sebagai berikut:

A. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2023

1. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 harus dapat tercapai dengan baik dan tidak menumpuk diakhir Tahun.
2. Terkait dengan penyerapan APBD induk Tahun Anggaran 2023 yang belum sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran sehingga pelaksanaannya menumpuk di perubahan, oleh sebab itu mohon agar perubahan APBD ini bisa dimulai di awal bulan perubahan APBD.
3. Kami **menerima dan menyetujui** Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 untuk disahkan menjadi Perda.

B. RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Kami **menerima dan menyetujui** Raperda Kabupaten Rembang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk disahkan menjadi Perda.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi NasDem terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Semoga bisa bermanfaat untuk Kabupaten Rembang dan semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk serta jalan yang terbaik kepada kita semua. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 29 September 2023

**KETUA
FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT" and "DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG".

H. MASHADI, S.Pd., M.M.



PDI PERJUANGAN

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2023
DAN
RANCANGAN PERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Disampaikan Oleh :

**D a l a m
RAPAT PARIPURNA I
DPRD KABUPATEN REMBANG
JUM'AT, 29 SEPTEMBER 2023**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

FRAKSI PDI PERJUANGAN

Sekretariat : JL. P. Diponegoro.88 Rembang 59212
Telp. : (0295) 6911494

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PDI PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD

KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2023

DAN

RANCANGAN PERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

MERDEKA!

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang,

Yang terhormat, Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kab. Rembang,

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang,

Yang Terhormat, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Para Kabag di lingkungan Setda Kabupaten Rembang,

Yang terhormat, Ka Dinas/Badan, Ka Kantor/Instansi dan Camat se- Kabupaten Rembang,

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Para Kabag beserta jajarannya, Lsm, Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang kami hormati.

Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi kali ini marilah kita bersama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari ini. Berikut Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di Yaumul Mahsyar. Aamiin Ya Robbal Alamin...

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,

Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada Pimpinan Rapat beserta unsur Pimpinan Dewan, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan terhadap hasil pembahasan rancangan perda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan rancangan perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tak lupa, kami juga mengucapkan "Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW" yang jatuh pada tanggal 28 September 2023 kemarin, semoga kita semua selalu mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Aamiin Ya Robbal Alamin..

Selanjutnya, menanggapi hasil pembahasan rancangan perda tentang perubahan APBD Kabupaten Rembang tahun anggaran 2023 dan rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kami memutuskan dapat **MENERIMA dan MENYETUJUI** rancangan perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan rancangan perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan catatan :

- I. Mengingat waktu efektif yang tersisa untuk pelaksanaan kegiatan tersisa 3 (tiga) bulan lagi, maka kami mengharapkan Pemerintah Kabupaten dapat terus meningkatkan dan mendorong kinerjanya dengan bekerja lebih keras dan lebih serius dalam merealisasikan kegiatan dan memaksimalkan penyerapan anggaran. Sehingga nanti di akhir tahun 2023 ini dapat menyelesaikan semua kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan.
- II. OPD-OPD sebagai pelaksana kegiatan agar dapat berperanserta dalam memantau usulan-usulan masyarakat yang tertuang dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah, sehingga masyarakat dapat segera menikmati program yang telah mereka usulkan dalam tahun anggaran saat ini.

Hadirin Sidang Paripurna yang kami Hormati,

Demikian telah kami sampaikan Pendapat Fraksi PDI Perjuangan. Semoga rancangan perda perubahan APBD Kabupaten Rembang tahun anggaran 2023 serta rancangan perda Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang nantinya disahkan, dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan dan bermanfaat bagi kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Rembang. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, semoga kita semua selalu diberikan petunjuk, kemudahan, kelancaran serta perlindungan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Aamiin..Aamiin..Yarobbal allamin..

Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka....Merdeka....Merdeka....

**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA

SEKERTARIS

JASMANI

WIDODO SH.

PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT-HANURA
ATAS
RAPERDA PERUBAHAN DAN APBD TA. 2023 DAN
RAPERDA PAJAK DAERAH DAN TERIBUSI DAERAH



FRAKSI DEMOKRAT – HANURA
DPRD KABUPATEN REMBANG

REMBANG, JUMAT 29 SEPTEMBER 2023

DIBACAKAN OLEH :



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT-HANURA**

Jl. Diponegoro No. 88 RembangTelp. (0295) 691194

PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT – HANURA

ATAS

**RAPERDA PERUBAHAN APBD TA. 2023 DAN RAPERDA PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2023

DIBACAKAN OLEH :

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati,

Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Yang Terhormat,

Saudara Sekretaris DPRD, Staff Ahli Bupati, Asisten Sekda dan Kepala Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Bagian Camat Se Kabupaten Rembang dan para hadirin sekalian yang berbahagia

Mengawali pendapat Fraksi ini, marilah kita tidak henti – hentinya mengucapkan Puji Syukur atas kehadiran ALLAH SWT Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufiq dan inayahNya sehingga pada saat ini kita masih bisa menikmati karunia dan rahmatNya. Kami Fraksi Demokrat – Hanura mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, semoga kita selaku umatnya bisa menjadikan rasullulah SAW sebagai teladan. Amin Ya Robbal Alamin.

Bupati, Wakil Bupati, Sidang Dewan yang saya Hormati

Terimakasih kepada saudara pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Demokrat - Hanura untuk menyampaikan pendapat Akhir fraksi tentang Raperda Perubahan APBD TA. 2023 dan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kami Fraksi Demokrat – Hanura untuk pandangan kali ini tidak akan memberikan saran, pendapat dan masukan terkait dengan Pendapat Akhir Fraksi tentang APBD Perubahan ini, karena kami sudah tidak sanggup lagi berkata kata.kami Anggota DPRD diam salah kami bersuara Lantang juga salah dan juga kami berharap dengan di sahkan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa dampak positif kepada masyarakat khususnya Kabupaten Rembang.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim Kami fraksi Demokrat – Hanura ***Menerima dan Menyetujui*** Raperda Perubahan APBD TA. 2023 dan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Perda Perubahan APBD TA. 2023 dan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Semoga dengan disahkan 2 Perda tersebut sebagai payung hukum untuk pelaksanaan peningkatan kesejahteraan umat khususnya masyarakat Kabupaten Rembang.

Bupati, Wakil Bupati, Sidang Dewan yang saya Hormati

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Demokrat-Hanura ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kab.Rembang serta Saudara Sekertaris DPRD Rembang beserta staff, Kami ucapkan terimakasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab membangun masyarakat, bangsa dan Negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 29 September 2023

FRAKSI DEMOKRAT - HANURA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA

SEKRETARIS



MUGIARTO S.T

DUMADIYONO, S.H.

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA
(F-KIS)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Terhadap

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Tentang

1. PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2023.
2. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Rembang

Hari Kamis, 29 September 2023
Juru Bicara: **PUJI SANTOSO, S.P., M.H.**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Staf Ahli Bupati Rembang
- Yang kami hormati Kepala Badan / Dinas / Instansi / Kantor / Bagian se-Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Camat se-Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang dan jajarannya.
- Yang kami hormati rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pendapat Akhir Fraksi kali ini, perkenankanlah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Alloh SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua. Sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini.

Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaat-nya di Yaumil Akhir nanti.

Perkenankanlah kami mengucapkan Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad S.A.W yang jatuh pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 Masehi kemaren. "Maulid Nabi adalah hari untuk merenungkan keadilan, kasih sayang, dan kepedulian yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mengikuti jejak-Nya."

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Fraksi KIS sangat mengapresiasi atas segala daya upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab atas kinerjanya, meskipun dalam situasi APBD yang kondisi sulit, kami yakin Pemerintah Daerah bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat.

Kami telah mendengar dan menyimak pengantar nota keuangan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Oleh karena itu ijin kami Fraksi Karya Indonesia Sejahtera menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD kabupaten Rembang Tahun 2023 dan Raperda Tentang Pajak dan retribusi daerah.

Beberapa hal yang kami harapkan kepada Pemerintah Daerah antara lain :

A. TERKAIT PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2023 :

1. Dengan adanya APBD Perubahan diharapkan proses pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan semakin baik. Juga tata kelola keuangan Pemkab dapat dilakukan dengan lebih produktif, efektif, efisien, transparan, dan akuntable. Tidak ada lagi penundaan pencairan kegiatan dan semua target dapat diwujudkan.
2. Maka dibutuhkan komitmen yang tinggi dari semua penyelenggara dan stake holder yang ada agar proses pelaksanaan APBD berjalan lancar dan optimal.

B. TERKAIT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH :

1. Raperda PDRB sesungguhnya disusun dalam rangka penguatan struktur keuangan daerah agar siap menjadi daerah yang kokoh, oleh karena itu penetapan raperda ini sangat penting dan strategis serta perlu didukung oleh semua pihak. Tentunya dengan tetap menjaga kemampuan dan daya beli masyarakat agar tidak merasa terbebani dan siap mendukung pelaksanaannya sesuai harapan kita semua.

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Fraksi Karya Indonesia Sejahtera **MENERIMA & MENYETUJUI** RAPERDA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RAPERDA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

Menutup Pendapat Akhir Fraksi KIS ini mari kita berdoa semoga kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa bekerja menunaikan semua amanah kita.

Bila ada kata-kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pandangan Fraksi Karya Indonesia Sejahtera (F-KIS) kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA**

Ketua,

Sekretaris,


WIWIN WINARTO, S.H.




AGUS SUTRISNO



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan adanya perubahan terhadap asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, di perlukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Rembang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan: 1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 29 September 2023.
 2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 29 September 2023.
 3. Pembicaraan- pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 29 September 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 beserta perubahan-perubahannya sebagaimana tersebut dalam laporan Badan Anggaran untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 September 2023
KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG
H. SUPADI *uf*





BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RAPERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana amanat Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berasal dari Bupati telah dibahas bersama dengan DPRD dan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Penetapan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penetapan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.
- KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 29 September 2023

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG





BUPATI REMBANG

**PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS HASIL
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RAPERDA
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH**

DALAM RAPAT PARIPURNA II DPRD

Rembang, 29 September 2023

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Ykh. - Ketua DPRD Kabupaten Rembang;
- Para Ketua Komisi dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang;
- Rekan-Rekan Forkopimda Kabupaten
Rembang;

- Wakil Bupati Rembang;
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala OPD se-Kabupaten Rembang;
- Para Camat dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Mengawali pertemuan kali ini perkenankanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Ridho-Nya-lah kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka **“Persetujuan Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan**

Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, dalam keadaan sehat wal’fiat.

Kami sampaikan **“terima kasih”** kepada semua pihak, terutama jajaran DPRD yang telah mendukung dan mencurahkan perhatian dengan semangat yang tinggi membahas hingga selesainya proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 sehingga berjalan lancar dan tepat waktu.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk mensinkronkan program dan kegiatan baru yang berkaitan dengan dana transfer pemerintah pusat, sehingga mempengaruhi belanja daerah, guna mempercepat program-program pembangunan yang mendesak untuk segera dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menikmati program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rembang.

Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 ini, pada setiap program yang akan dilaksanakan memberikan manfaat kepada masyarakat dengan kuantitas dan kualitas yang terencana dan terukur. Hal ini merupakan implementasi dari fungsi perencanaan, fungsi koordinasi dan motivasi serta fungsi pengendalian

dan evaluasi pelaksanaan strategi kinerja Pemerintah Daerah sebagai bentuk manajemen koordinasi yang baik.

Dengan demikian melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ini diupayakan seoptimal mungkin dapat menampung aspirasi berbagai program dan kegiatan yang berkembang di masyarakat. Sehingga dengan anggaran ini dapat menyempurnakan program atau kegiatan yang sudah berjalan maupun yang belum teranggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022, baik kegiatan yang bersifat keharusan dan instruksional.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, kita telah melaksanakan koordinasi dan pembahasan yang sistematis dan terencana baik pada tingkat komisi maupun Badan Anggaran, dalam rangka

untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap setiap perencanaan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam program dan kegiatan, serta besaran Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Peraturan daerah ini akan menjadi pedoman dan rujukan kebijakan kita pada tahun 2023 dalam melaksanakan aktivitas pemerintah dan pembangunan Kabupaten Rembang diberbagai sektor. Untuk itu, saya optimis bahwa kebijakan anggaran yang telah disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dapat kita manfaatkan secara efektif untuk memacu pembangunan dan pertumbuhan perekonomian demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang yang kita cintai ini.

Adapun Rancangan Anggaran Pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar

Satu triliun sembilan ratus lima puluh dua milyar sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah, mengalami kenaikan sebesar satu koma dua persen dari Induk APBD Tahun Anggaran 2023 sejumlah Satu Triliun sembilan ratus tiga puluh lima milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah, maka terdapat kenaikan sebesar Enam belas milyar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah.

Selanjutnya untuk Rancangan Perubahan Anggaran Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar *Dua triliun tujuh milyar delapan ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah* mengalami penurunan minus satu koma tujuh puluh persen, dibanding anggaran belanja Induk APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar *Dua triliun tiga puluh tujuh milyar lima ratus lima*

puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah, maka terjadi penurunan minus Dua puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh satu milyar seratus dua belas juta dua ratus empat belas rupiah.

Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat defisit sebesar *Lima puluh lima milyar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*, yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar *Lima puluh lima milyar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*, sehingga pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi balance.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sejalan dengan tujuan otonomi daerah, pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus senantiasa ditingkatkan demi mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan penyesuaian objek retribusi dan tarif retribusi. Harapannya hal itu dilakukan agar pengelolaan retribusi ke depan dapat lebih optimal dan menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Melalui rapat Paripurna ini pula, sekali lagi saya atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang mengucapkan **terima kasih** kepada saudara Pimpinan dan segenap Anggota Dewan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta seluruh Pimpinan OPD beserta staf yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan penyusunan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 dan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini. Berbagai masukan, saran, dan kritik konstruktif yang disampaikan Badan Anggaran maupun lintas Komisi DPRD semoga dapat digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintah daerah, utamanya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Rembang.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna Persetujuan Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan ini Pemerintah Daerah setuju atas Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

12

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang. *Aamiin, Aamiin, Ya Robbal 'Alamiin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I